

LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEREKONOMIAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2019



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPPEDA)
SURAKARTA, 2019**

PRAKATA

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik, hidayah dan kekuatan Nya sehingga penulisan Laporan Akhir Evaluasi Kinerja Perekonomian di Kota Surakarta dapat terselesaikan. Laporan ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada pihak pemberi tugas dalam hal ini Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta.

Tim kajian mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Laporan ini merupakan kerjasama yang baik antara Bidang Ekonomi Bappeda Kota Surakarta dibantu oleh tim konsultan dan pemangku kepentingan di Kota Surakarta. Laporan ini tentu masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik diharapkan untuk penyempurnaan laporan pada masa yang akan datang.

Semoga kajian dapat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan di Kota Surakarta.

Surakarta, 2019

Tim Kajian

DAFTAR ISI

PRAKATA	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Tujuan Kegiatan	9
1.3. Manfaat Kegiatan	9
1.4. Lingkup Kegiatan	10
1.5. Metodologi	10
1.6. Sistematika Laporan	14
BAB II GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN KOTA SURAKARTA	15
2.1. Visi Dan Misi Kota Surakarta	15
2.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi	17
2.3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	18
2.4. Kesejahteraan	20
2.5. Indikator Kemiskinan	23
2.6. Indikator Pendidikan	24
BAB III KONSEP DAN METODE KAJIAN	26
3.1. Aspek Kependudukan dalam Pembangunan Daerah	26
3.2. Pengangguran, Kemiskinan, Pembangunan Ekonomi Lokal ..	29
3.3. Kependudukan dan Pertumbuhan Ekonomi	32
3.4. Kemiskinan	33
3.5. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi	35
3.6. Konsentrasi Kemiskinan	37
3.7. Metodologi	38
3.7.1. Pendekatan Kajian	38
3.7.2. Sumber dan Ketersediaan Data	39
3.7.3. Prosedur Penentuan PDRB Kecamatan	40
3.7.4. Kerangka Pikir Kajian	41

	3.8. Hasil Pengolahan Data	41
BAB IV	HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	43
	4.1. Analisis Evaluasi erekonomian Kota Surakarta	43
	4.1.1. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi	43
	4.1.2. Inflasi	47
	4.1.3. Kemiskinan dan Ketimpangan	49
	4.1.4. Ketenagakerjaan	53
	4.1.5. LQ dan Shift-Share	59
	4.2. Analisis Perbandingan Antar Wilayah Di Jawa Tengah	63
	4.2.1. Petumbuhan Ekonomi dan Inflasi	63
	4.2.2. Kemiskinan dan Ketimpangan	66
	4.2.3. Tingkat Pengangguran	71
	4.2.4. Indikator Sosial dan Kesejahteraan	72
	4.3. Analisis Capaian Kinerja Indkator RPJMD	79
	4.4. Peringkat Kinerja Makroekonomi Kota Surakarta	86
	4.4.1. Skenario 1	89
	4.4.2. Skenario 2	90
BAB V	Kesimpulan dan Rekomendasi	91
	5.1. Kesimpulan	91
	5.2. Rekomendasi	91
	DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Matriks Kinerja	13
Tabel 1.2.	Matrik Kinerja Berdasarkan Informasi Analisis Capaian Indikator Kinerja dan Analisis Kinerja	13
Tabel 2.1.	Target Indikator Makroekonomi RPJMD Kota Surakarta	16
Tabel 2.2.	Struktur PDRB Kota Surakarta 2010-2018	18
Tabel 2.3.	Perbandingan Pertumbuhan Penduduk 2012-2018	19
Tabel 2.4.	Indikator Kemiskinan Kota Surakarta	23
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi	41

Tabel 3.2	Angka Harapan Hidup (AHH)	42
Tabel 3.3	Harapan Lama Sekolah	42
Tabel 3.4	Rata-Rata Lama Sekolah	42
Tabel 3.5	Pengeluaran Perkapita	42
Tabel 4.1.	PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2010 dan 2018	43
Tabel 4.2.	Proporsi dan Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harg Berlaku Tahun 2010 dan 2018	44
Tabel 4.3.	Proporsi dan Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan 2018	45
Tabel 4.4.	Rasio Terhadap PDRB	46
Tabel 4.5.	Perbandingan PDRB Perkapita Riil Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah	46
Tabel 4.6.	Perbandingan PDRB Perkapita Riil Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah	47
Tabel 4.7.	Perkembangan Laju Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang	48
Tabel 4.8.	Perbandingan Inflasi Sektoral 2010 dan 2018	49
Tabel 4.9.	Indikator Kemiskinan Surakarta 2010-2018	50
Tabel 4.10.	Proxy Indeks Gini Berdasarkan Indeks Williamson	52
Tabel 4.11.	Angkatan Kerja Kota Surakarta 2017	54
Tabel 4.12.	Angkatan Kerja Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan Tertinggi tahun 2017	55
Tabel 4.13.	Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Surakarta, 2017	56
Tabel 4.14.	Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Surakarta, 2017	57
Tabel 4.15.	Hasil Analisis Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Lapangan Usaha, 2010-2018	61
Tabel 4.16.	Hasil Analisis Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Lapangan Usaha, 2010-2018	63
Tabel 4.17.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Surakarta vs Provinsi vs Nasional	64
Tabel 4.18.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah	64
Tabel 4.19.	Perbandingan Inflasi Surakarta vs Provinsi vs Nasional	65

Tabel 4.20.	Perbandingan Inflasi Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah ..	65
Tabel 4.21.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Surakarta vs Provinsi vs Nasional	67
Tabel 4.22.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah	67
Tabel 4.23.	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	68
Tabel 4.24.	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	69
Tabel 4.25.	Perbandingan Garis Kemiskinan Surakarta vs Provinsi vs Nasional	70
Tabel 4.26.	Perbandingan Garis Kemiskinan Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah	70
Tabel 4.27.	Perbandingan Indeks Gini Surakarta vs Provinsi vs Nasional ..	71
Tabel 4.28.	Perbandingan Indeks Gini Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah	71
Tabel 4.29.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah	72
Tabel 4.30.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah	72
Tabel 4.31.	Angka Harapan Hidup (AHH)	73
Tabel 4.32.	Harapan Lama Sekolah	73
Tabel 4.33.	Rata-Rata Lama Sekolah	73
Tabel 4.34.	Pengeluaran Perkapita	74
Tabel 4.35.	Angka Harapan Hidup (AHH)	74
Tabel 4.36.	Harapan Lama Sekolah	75
Tabel 4.37.	Rata-Rata Lama Sekolah	75
Tabel 4.38.	Pengeluaran Perkapita	75
Tabel 4.39.	Perbandingan IPM Surakarta vs Provinsi Jawa Tengah vs Nasional	76
Tabel 4.40.	Perbandingan IPM Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta 2010-2018	17
Gambar 2.2.	Tingkat Penganggura 2010-2018	20

Gambar 2.3.	PDRB Perkapita-ADHB 2010-2018	21
Gambar 2.4.	Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kota Surakarta 2011-2018	21
Gambar 2.5.	Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta 2010-2018	22
Gambar 2.6.	Gini Ratio Kota Surakarta 2000-2015	23
Gambar 2.7.	Angka Partisipasi Kasar Kota Surakarta 2010-2017	24
Gambar 3.1.	Kurva Lorenz	36
Gambar 2.8.	Angka Partisipasi Murni Kota Surakarta 2000-2015	25
Gambar 3.2.	Kerangka Pemikiran	41
Gambar 4.1.	Perkembangan Laju Inflasi 2010-2018	47
Gambar 4.2.	Tingkat Kemiskinan VS P1 VS P2	50
Gambar 4.3.	Pertumbuhan Ekonomi VS Tingkat Kemiskinan	51
Gambar 4.4.	Indeks Williamson VS Indeks Gini	52
Gambar 4.5.	Kemiskinan VS Ketimpangan	53
Gambar 4.6.	Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Pengangguran	58
Gambar 4.7.	Hubungan Tingkat Pengangguran dengan Tingkat Ketimpangan	58
Gambar 4.8.	Pertumbuhan Ekonomi VS Inflasi	66
Gambar 4.9.	Perbandingan APK SD/MI Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah	77
Gambar 4.10.	Perbandingan APK SMP/MTs Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah	78
Gambar 4.11.	Perbandingan APK SMA/MA/SMK Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Evaluasi merupakan kegiatan yang mutlak diperlukan dalam pembangunan daerah. Berbagai peraturan perundangan menyatakan bahwa kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap daerah, misalnya evaluasi pelaksanaan RKPD atau RPJMD. Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan tujuan tertentu.

Menurut *Local Economic and Employment Development* atau LEED (2009) evaluasi dalam terminologi ekonomi adalah penentuan perkembangan kemajuan dari kebijakan, program, atau proyek yang menyebabkan perubahan. Evaluasi merupakan hal yang sangat penting kaitannya dengan pembuatan kebijakan dan perencanaan. Evaluasi memungkinkan desain dan modifikasi kebijakan dan program yang dibuat dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pengertian lain dari evaluasi diungkapkan oleh Chelimsky (1989) yaitu suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektivitas suatu program. Wirawan (2006) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai objek yang dievaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi. Dari beberapa pengertian yang ada memberikan pengertian yang secara substantif sama, bahwa evaluasi merupakan cara yang dipergunakan untuk melihat bagaimana implementasi dari program atau kebijakan yang telah disusun sebelumnya, melalui suatu metode tertentu.

Menurut LEED (2009) evaluasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif (*summative evaluation*). Evaluasi formatif merupakan evaluasi terhadap suatu proses sedangkan evaluasi sumatif merupakan evaluasi terhadap dampak atau *outcome*. Evaluasi formatif berfokus pada bagaimana program dijalankan sedangkan evaluasi sumatif berfokus pada bagaimana hasil dari program tersebut.

Menurut LEED (2009) pengertian evaluasi berbeda dengan pengertian monitoring. Monitoring berkaitan dengan apa yang terjadi berdasarkan informasi

yang dikumpulkan sementara evaluasi memberikan dasar dalam justifikasi dan keputusan antara “ya” dan “tidak”, misalnya hasil evaluasi menyimpulkan suatu program “tercapai” dan “tidak tercapai” atau “sesuai” dan “tidak sesuai”, dan sebagainya. Untuk itu dalam evaluasi dibutuhkan data yang *reliable*, akurat, dan mutakhir (LEED, 2009:11). Solihin (2012) membedakan monitoring dan evaluasi dari aspek: tujuan, fokus, cakupan, serta waktu pelaksanaan. Dalam hal tujuan misalnya, monitoring menilai kemajuan dalam pelaksanaan program sementara evaluasi memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program. Dalam hal waktu, monitoring dilakukan secara terus menerus atau berkala selama pelaksanaan program sedangkan evaluasi dilaksanakan pada pertengahan atau akhir program.

Evaluasi kinerja makroekonomi Kota Surakarta merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk melihat dan mengamati sejauh mana pembangunan daerah khususnya bidang makroekonomi telah sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini perlu dilakukan agar kebijakan dan strategi yang telah disusun dapat berjalan efektif. Dengan kegiatan evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi kinerja makroekonomi Kota Surakarta, serta posisi Kota Surakarta diantara daerah lain sehingga kebijakan dan strategi yang disusun untuk periode ke depan dapat disusun secara lebih efektif berdasarkan situasi dan kondisi yang telah berjalan.

1.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah

1. Mengidentifikasi capaian kinerja makroekonomi Kota Surakarta dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi, dan program di periode mendatang.
2. Mengidentifikasi permasalahan makroekonomi Kota Surakarta yang muncul
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi pembangunan makroekonomi Kota Surakarta di periode pembangunan berikutnya.

1.3. Manfaat Kegiatan

Manfaat dari kegiatan ini adalah

1. Teridentifikasinya capaian kinerja makroekonomi Kota Surakarta sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan makroekonomi.
2. Dapat diketahuinya pokok-pokok permasalahan makroekonomi Kota Surakarta sehingga dapat disusun prioritas kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi pokok permasalahan tersebut
3. Tersusunnya alternatif rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dan pokok permasalahan dalam makroekonomi Kota Surakarta.

1.4. Lingkup Kegiatan

Lingkup dari kegiatan ini adalah

1. Analisis capaian kinerja pembangunan ekonomi Kota Surakarta yang meliputi:
 - a) Analisis PDRB (PDRB perkapita, pertumbuhan ekonomi, sektoral PDRB)
 - b) Analisis ketenagakerjaan (angkatan kerja, pengangguran)
 - c) Analisis kemiskinan dan ketimpangan (tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan)
 - d) Analisis inflasi (inflasi umum, inflasi sektoral)
 - e) Analisis kesejahteraan masyarakat (angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran riil masyarakat, IPM, IPG)
2. Analisis perbandingan capaian kinerja makroekonomi Kota Surakarta dengan daerah lain (Solo Raya atau Jawa Tengah).
3. Analisis capaian kinerja pembangunan ekonomi Kota Surakarta sesuai dengan visi dan misi sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD).
 - a) Apakah prioritas dan sasaran pembangunan sudah sesuai dengan RPJMD?
 - b) Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja sesuai dan mengacu pada rencana program prioritas RPJMD?
 - c) Apakah indikator kinerja program dan kegiatan sesuai dan menunjang pencapaian target kinerja program prioritas RPJMD?

1.5. Metodologi

A. Tahapan Analisis

1. Studi literature tentang evaluasi kinerja makroekonomi Kota Surakarta.

2. Identifikasi dan pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan tujuan dan lingkup studi.
3. Pengolahan dan analisis data sekunder tahap 1 dengan alat analisis yang disesuaikan.
4. Pengolahan dan analisis data tahap 2.
5. Penyajian hasil analisis dalam forum FGD (kinerja capaian indikator serta relevansinya dengan dokumen perencanaan daerah).
6. Penyempurnaan hasil analisis dan penyajian laporan akhir.

B. Alat Analisis

B.1. Analisis Capaian Kinerja Makroekonomi

- Analisis PDRB

Alat analisis PDRB yang akan dipergunakan terdiri dari: analisis pertumbuhan ekonomi, analisis kontribusi sektoral, analisis rata-rata pertumbuhan ekonomi, analisis shift-share, dan analisis LQ.

- Analisis Ketenagakerjaan

Dalam hal ketenagakerjaan, akan dipergunakan alat analisis berupa: analisis statistik (pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan, dan koefisien variasi) profil pengangguran berdasarkan sektor ekonomi dan jenis kelamin, analisis tingkat pengangguran, analisis pertumbuhan pengangguran.

- Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan

Alat analisis yang akan dipergunakan meliputi: analisis statistik profil kemiskinan, analisis tingkat kemiskinan, analisis ketimpangan dengan rasio Gini atau Indeks Williamson.

- Analisis Inflasi

Inflasi akan dianalisis dengan alat berupa metode statistik (pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan, dan koefisien variasi) untuk melihat: profil inflasi secara umum serta inflasi sektoral.

- Analisis Kesejahteraan Masyarakat

Analisis ini dilakukan dengan metode statistika (pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan, dan koefisien variasi) guna mendapatkan informasi perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat.

- ### B.2. Analisis perbandingan capaian kinerja makroekonomi Kota Surakarta dengan daerah lain.

Analisis ini dilaksanakan dengan menggunakan metode statistic untuk membandingkan secara kuantitatif posisi kineja makroekonomi Kota Surakarta dengan daerah lain.

B.3. Analisis capaian kinerja pembangunan ekonomi Kota Surakarta sesuai dengan visi dan misi.

Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan indikator makroekonomi yang ada dengan indikator sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan RPJMD/RKPD yang dikaitkan dengan indikator visi-misi. Dalam pelaksanaan evaluasi, akan dilakukan analisis hal-hal sebagai berikut:

a. Tingkat Capaian Pelaksanaan Program Pembangunan bidang makroekonomi kaitannya dengan visi-misi dengan fokus:

- Apakah program bidang makroekonomi yang direncanakan telah dilaksanakan atau tidak?

b. Tingkat Capaian Kinerja dengan cara membandingkan realisasi pencapaian indikator kinerja bidang makroekonomi daerah dengan rencana target kinerja. Hasil analisis akan dibagi menjadi:

- Hasil analisis tingkat capaian kinerja program makroekonomi daerah;
- Analisis program apa saja yang dianggap perlu mendapat perhatian karena nilainya berada pada klasifikasi “Kurang Baik” atau “Sangat Kurang Baik”.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana diuraikan di atas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan antara realisasi kinerja dengan rencana kinerja pada setiap program dan kegiatan. Rencana kinerja dalam hal ini berupa target atau indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya baik indikator kinerja *input* maupun indikator kinerja *output*. Dengan membandingkan diantara keduanya, akan diperoleh persentase capaian indikator kinerja sebagai berikut:

$$CIK = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Apabila hubungan antara realisasi dengan rencana negatif dalam arti semakin kecil nilainya semakin baik, maka akan digunakan formula sebagai berikut:

$$CIK = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

CIK=Capaian Indikator Kinerja (%).

2. Menyusun Matriks Kinerja

Penyusunan matriks kinerja ini dilakukan dengan cara membuat pemetaan (*mapping*) setiap program atau kegiatan ke dalam suatu matriks berdasarkan hasil analisis sebelumnya.

Tabel 1.1. Matriks Kinerja

		CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIAYA		
		SANGAT TINGGI DAN TINGGI	SEDANG	RENDAH DAN SANGAT RENDAH
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SANGAT TINGGI DAN TINGGI			
	SEDANG			
	RENDAH DAN SANGAT RENDAH			

Selain itu, matriks juga dapat disusun berdasarkan informasi analisis capaian indikator kinerja dan analisis kinerja efisiensi seperti di bawah ini:

Tabel 1.2. Matriks Kinerja Berdasarkan Informasi Analisis Capaian Indikator Kinerja dan Analisis Kinerja

		CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
		SANGAT TINGGI DAN TINGGI	SEDANG	RENDAH DAN SANGAT RENDAH
ANALISIS KINERJA EFISIENSI	>1			
	<1			

Analisis kinerja efisiensi dalam hal ini merupakan perbandingan antara rencana biaya dengan realisasi biaya pada setiap program/kegiatan.

1.6. Sistematika Laporan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, proses dan penyusunan Kajian Evaluasi Kinerja Makroekonomi Kota Surakarta.

BAB II : Gambaran Umum Makroekonomi Kota Surakarta

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran secara umum kinerja makroekonomi Kota Surakarta, yang juga dikaitkan relevansinya dengan dokumen RPJMD dan RKPD, sehingga kegiatan analisis dapat lebih fokus.

BAB III : Konsep Evaluasi Pembangunan dan Metoda Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan tentang konsep dasar evaluasi pembangunan daerah khususnya bidang makroekonomi, serta cara pengumpulan dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis ekonomi regional secara utuh mengenai kondisi makroekonomi Kota Surakarta beserta analisis data dengan metode yang sesuai, sehingga dapat diketahui kinerja dan kesesuaian pembangunan ekonomi dengan dokumen visi dan misi sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

BAB V : Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis dan pembahasan dalam penyusunan kajian regional Kota Surakarta.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KINERJA PEREKONOMIAN KOTA SURAKARTA

2.1. Visi Dan Misi Kota Surakarta

Visi Kota Surakarta Tahun 2016–2021 adalah Terwujudnya Kota Surakarta sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera. Penjabaran Visi Kota Budaya akan diterjemahkan dalam Misi. Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus ada dan bagaimana komitmen terus dijaga oleh segenap *stakeholders* selaku pemangku kepentingan dalam pembangunan.

Misi Kepala Daerah Terpilih tahun 2016-2021 adalah “**Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan.**” Penjabaran misi pembangunan Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut:

1. Waras

Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat.

2. Wasis

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri, dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah.

3. Wareg

Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani.

4. Mapan

Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter, dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif dan melayani.

5. Papan

Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan infrastruktur dan

fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya.

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, Surakarta perlu melakukan kerjasama dengan daerah sekitar. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh poisisi geografis Surakarta yang sangat strategis. Dalam RPJMD, sesuai RTRW Kawasan Kerjasama Regional yang terkait dengan Kota Surakarta adalah Kawasan Subosukawonosraten dan Kawasan Sosebo (Solo, Selo/Boyolali, dan Borobudur) yang memiliki SDA, kesuburan tanah, dan objek wisata. Dalam regional Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta dijadikan kawasan peruntukan industri skala wilayah untuk produk-produk unggulan berbasis industri kerajinan dan kawasan pariwisata.

Tingkat ketercapaian visi-misi dituangkan melalui berbagai indikator Antara lain indikator makroekonomi daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD. Indikator tersebut dipergunakan sebagai salah satu bentuk evaluasi kinerja makroekonomi. Target indikator kinerja makroekonomi Kota Surakarta hingga 2018 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Target Indikator Makroekonomi RPJMD Kota Surakarta

No	Indikator	Target		
		2016	2017	2018
1	Pertumbuhan ekonomi/PDRB	5 + 1	5 + 1	6 + 1
2	Tingkat inflasi	3 + 1	4 + 1	3 + 1
3	Indeks Gini	0.332	0.321	0.320
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9.64	8.99	8.34
5	Angka Harapan Hidup (tahun)	77.08	77.11	77.16
6	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10.44	10.51	10.59
7	Harapan lama sekolah (tahun)	14.34	14.53	14.73
8	Pengeluaran per kapita (Rupiah)	14,291,000.00	14,806,000.00	15,301,000.00
9	Pendapatan per kapita (Rupiah)	58,142,285	60,922,566	63,823,146
10	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	97.08	97.37	97.67
11	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	5.83	5.76	5.68

2.2. Pertumbuhan Ekonomi Dan Struktur Ekonomi

Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Surakarta tercatat 5,41%. Pertumbuhan ekonomi ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017 yang besarnya adalah 5,33%. Sepanjang 2010-2018, pertumbuhan ekonomi terendah Surakarta adalah pada tahun 2016 sebesar 5,32% sedangkan yang tertinggi adalah tahun 2011 yang mencapai 6,42%. Dengan menggunakan rata-rata geometri, rata-rata pertumbuhan ekonomi Surakarta per tahun selama 2010-2018 adalah 5,60%.



Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta 2010-2018

Sumber: BPS Kota Surakarta

Berdasarkan pendekatan harga berlaku (*current price*), perekonomian Surakarta pada tahun 2018 didominasi oleh 4 sektor utama, yaitu sektor konstruksi (27,16%), sektor perdagangan besar dan eceran (22,24%), sektor informasi dan komunikasi (11,39%), serta sektor industry pengolahan (8,40%). Perhitungan dengan menggunakan harga konstan menunjukkan adanya sedikit perbedaan dengan perhitungan harga berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi sektoral di Surakarta relative terkendali atau tidak bergejolak.

Dibandingkan dengan tahun 2010, kontribusi beberapa sektor yang menunjukkan peningkatan adalah sektor industry pengolahan (dari 7,62% menjadi 8,40%), sektor transportasi dan pergudangan (dari 2,64% menjadi 2,70%), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (dari 4,87% menjadi 5,67%), sektor informasi dan komunikasi (dari 11,36% menjadi 11,39%), sektor jasa keuangan dan asuransi (3,65% menjadi 3,86%), sektor jasa perusahaan (dari 0,64% menjadi 0,84%),

sektor jasa pendidikan (dari 3,66% menjadi 5,32%), serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (dari 0,85% menjadi 1,11%). Dengan demikian selama 2010-2018 terlihat adanya perubahan struktur ekonomi Surakarta menjadi kota perdagangan, jasa, dan industry yang didukung dengan transportasi dan pendidikan.

Tabel 2.2. Struktur PDRB Kota Surakarta 2010-2018

Lapangan Usaha	ADHB		ADHK	
	2010	2018	2010	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.50	0.49	0.50	0.43
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00
Industri Pengolahan	7.62	8.40	7.62	7.63
Pengadaan Listrik dan Gas	0.22	0.20	0.22	0.23
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.22	0.14	0.22	0.17
Konstruksi	28.23	27.16	28.23	26.08
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23.82	22.24	23.82	23.33
Transportasi dan Pergudangan	2.64	2.70	2.64	2.89
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.87	5.67	4.87	5.01
Informasi dan Komunikasi	11.36	11.39	11.36	14.34
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.65	3.86	3.65	3.39
Real Estate	4.23	3.98	4.23	4.31
Jasa Perusahaan	0.64	0.83	0.64	0.76
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.46	5.57	6.46	5.21
Jasa Pendidikan	3.66	5.32	3.66	4.19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.85	1.11	0.85	1.05
Jasa lainnya	1.04	0.93	1.04	0.97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Kota Surakarta

2.3. Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

Jumah penduduk Surakarta tahun 2018 berdasarkan data BPS adalah 517. 887 jiwa. Jumlah penduduk ini naik sebesar 0,45% bila dibandingkan dengan tahun 2017. Sepanjang 2010-2018 pertumbuhan jumlah penduduk Surakarta menunjukkan tren

yang menurun. Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, pertumbuhan penduduk Surakarta lebih rendah sepanjang 2010-2018.

Tabel 2.3. Perbandingan Pertumbuhan Penduduk 2012-2018

Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Surakarta	0.53	0.50	0.47	0.45	0.42	0.38	0.38	0.35
Jawa Tengah	0.87	0.84	0.81	0.78	0.75	0.73	0.70	0.68
Nasional	1.46	1.42	1.38	1.35	1.31	1.27	1.23	1.19

Sumber: BPS Kota Surakarta

Dilihat dari sebarannya, berdasarkan data dari Disdukcapil Kota Surakarta, sebagian besar penduduk bermukim di Kecamatan Banjarsari (31,71%) dan yang terkecil adalah jumlah penduduk di Kecamatan Serengan (9,51%). Meski Kecamatan Serengan memiliki jumlah penduduk terkecil, namun memiliki tingkat kepadatan tertinggi yaitu 16.816/km² karena kecamatan ini memiliki luas paling kecil dibandingkan lainnya. Dari sisi kelompok umurnya, piramida penduduk Surakarta cenderung datar karena proporsi penduduk antar kelompok umur tidak berbeda jauh mulai kelompok umur 0-4 tahun hingga 55-59 tahun sedangkan mulai kelompok umur 60 ke atas memiliki proporsi semakin kecil.

Dari sisi tingkat pengangguran, pada tahun 2018 tingkat pengangguran Surakarta mencapai 4,39%. Tingkat pengangguran dihitung dari perbandingan Antara jumlah pengangguran terbuka dengan angkatan kerja. Pengangguran yang terjadi pada tahun 2018 tersebut turun apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran 2017 yang mencapai 4,47%. Sepanjang 2010-2018 tingkat pengangguran tertinggi adalah pada tahun 2010 yang mencapai 8,73% dan yang terendah adalah tingkat pengangguran pada tahun 2018. Tingkat pengangguran terlihat menunjukkan tren yang terus menurun mulai 2013-2018.



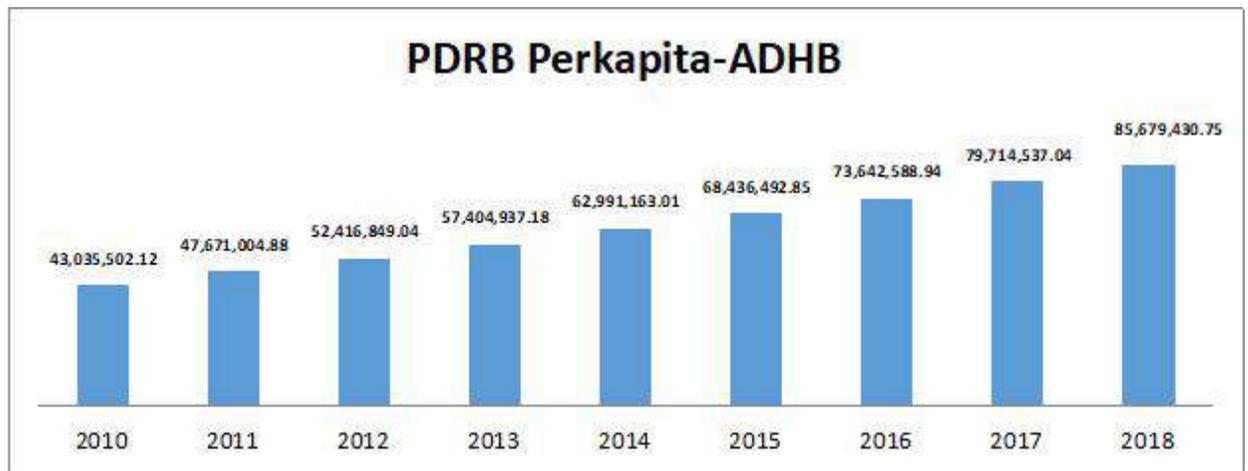
Gambar 2.2. Tingkat Pengangguran Kota Surakarta 2010-2018

Sumber: BPS Kota Surakarta

2.4. Kesejahteraan

Salah satu indikator kesejahteraan adalah PDRB perkapita yang merupakan perbandingan Antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2018 PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga berlaku adalah Rp85,6 juta. Hal ini berarti pendapatan per orang per tahun penduduk Surakarta adalah Rp85,6 juta, sementara apabila diukur berdasarkan harga konstan (PDRB riil) nilainya adalah sekitar Rp51,5 juta. Perbedaan ini terjadi karena PDRB harga berlaku menggunakan nilai tahun berjalan sementara pada harga konstan nilai PDRB menggunakan patokan harga pada tahun 2010 sebagai tahun dasar.

PDRB perkapita tahun 2018 tersebut naik sebesar 7,48% dibandingkan tahun 2017. Meskipun selama 2010-2018 PDRB perkapita menunjukkan tren yang terus naik, namun apabila dilihat dari pertumbuhan PDRB perkapita terlihat tren pertumbuhan semakin menurun.



Gambar 2.3. PDRB Perkapita-ADHB Kota Surakarta 2010-2018

Sumber: BPS Kota Surakarta

Pertumbuhan pendapatan perkapita sepanjang 2010-2018 yang tertinggi adalah tahun 2011 yaitu sebesar 10,77% dan yang terendah adalah tahun 2018 sebesar 7,48%. Kenaikan pertumbuhan pendapatan perkapita sepanjang 2010-2018 terjadi dua kali yaitu pada tahun 2014 dari 9,52% di tahun 2013 menjadi 9,73% di tahun 2014 serta tahun 2017 lalu dari 7,61% di tahun 2016 menjadi 8,25% di tahun 2017.

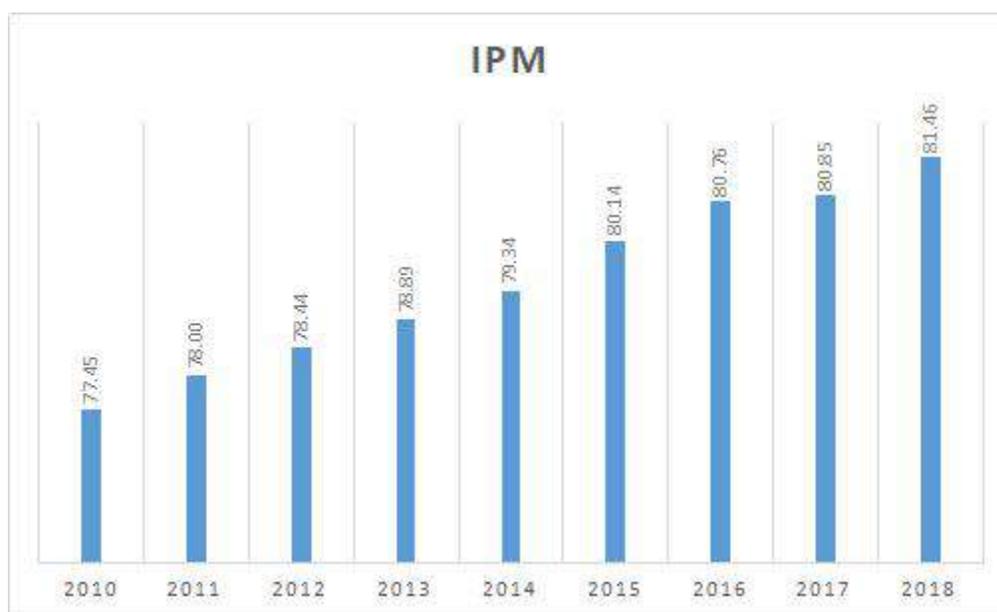


Gambar 2.4. Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kota Surakarta 2011-2018

Sumber: BPS Kota Surakarta

Dari sisi nilai indeks pembangunan manusia (IPM), pada tahun 2018 nilai IPM Surakarta cukup tinggi yaitu 81,46. IPM merupakan indeks komposit yang terdiri dari beberapa ukuran yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan

hidup, serta pengeluaran perkapita. Nilai ini naik cukup tajam bila dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 80,85. Sepanjang 2010-2018 nilai IPM menunjukkan kenaikan setiap tahun. Kenaikan yang terendah terjadi pada tahun 2016-2017 sebesar 0,09%. Nilai IPM Surakarta ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM provinsi maupun nasional. Hal ini merupakan indikasi bahwa pembangunan sumber daya manusia Surakarta menunjukkan keberhasilan.

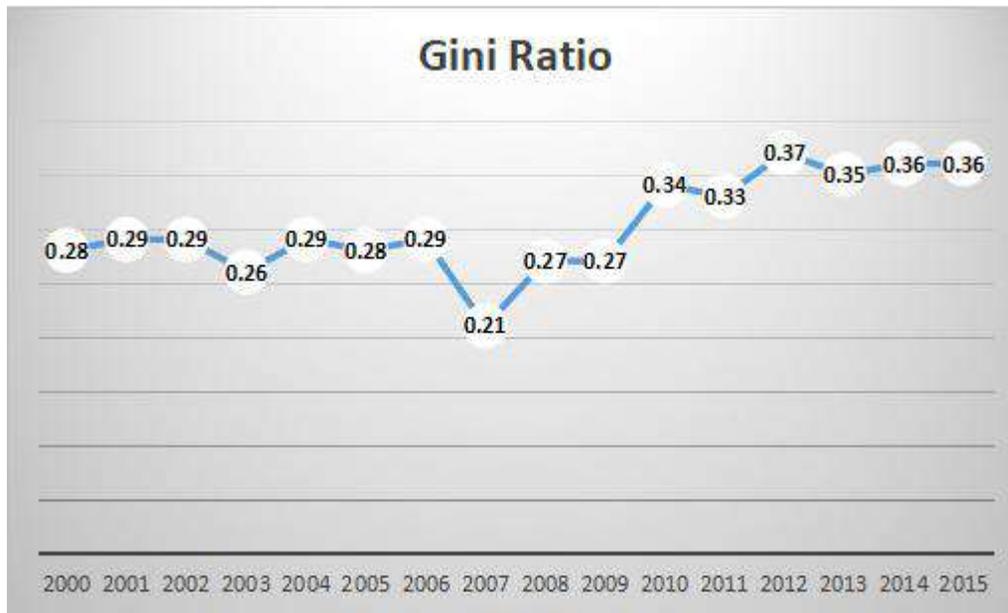


Gambar 2.5. Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta 2010-2018

Sumber: BPS Kota Surakarta

Hal yang berbeda terjadi pada ukuran ketimpangan menggunakan Gini Ratio atau Indeks Gini. Ukuran ini menunjukkan indikasi terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk. Data indeks Gini tingkat kabupaten/kota yang dirilis oleh BPS terakhir tahun 2015, dan mulai tahun 2016 indeks Gini yang dihitung dan dipublikasikan adalah indeks Gini untuk wilayah provinsi dan nasional.

Data indeks Gini selama 2000-2015 menunjukkan tren kenaikan, yang berarti tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk semakin meningkat. Selama periode tersebut indeks Gini terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 0,21 dan mulai 2010 nilai indeks Gini di atas 0,30.



Gambar 2.6. Gini Ratio Kota Surakarta 2000-2015

Sumber: BPS Kota Surakarta

2.5. Indikator Kemiskinan

Kemiskinan Surakarta dapat dilihat dari beberapa indikator seperti garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan.

Tabel 2.4. Indikator Kemiskinan Kota Surakarta

Indikator	2016	2017	2018
Garis Kemiskinan (rupiah)	430,293.00	448,062.00	464,063.00
Jumlah penduduk miskin (000 jiwa)	55.91	54.89	46.99
Persentase Penduduk Miskin (%)	10.88	10.65	9.08
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.34	1.87	1.47
Indeks Keparahan kemiskinan (P2)	0.35	0.44	0.35

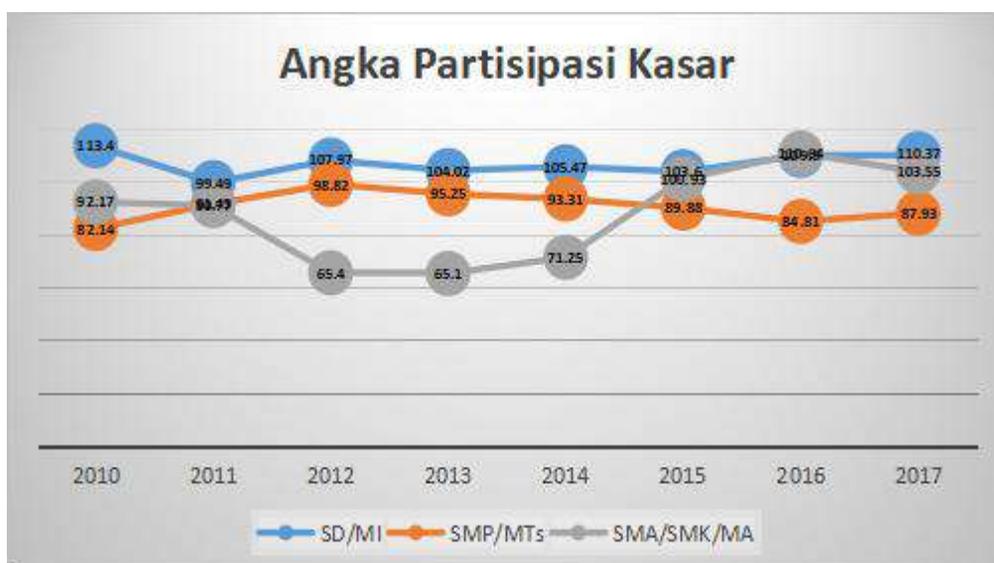
Sumber: BPS Kota Surakarta

Dari tinjauan garis kemiskinan, selama 2016-2018 terlihat garis kemiskinan Surakarta menunjukkan peningkatan dan pada tahun 2018 garis kemiskinan adalah Rp464.063 per orang per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa standar kemiskinan semakin naik. Jumlah penduduk miskin dari tahun 2016 hingga tahun 2018 menunjukkan penurunan terus menerus, khususnya dari tahun 2017 ke tahun 2018 yang mengalami penurunan sebesar 7.900 jiwa. Demikian pula halnya dengan tingkat

kemiskinan (rasio jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk pertengahan tahun) yang menunjukkan tren penurunan selama 2016-2018. Dari ukuran kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) tahun 2016-2017 terjadi kenaikan, namun pada 2017-2018 terjadi penurunan. Dengan demikian kenaikan garis kemiskinan pada tahun 2017 menyebabkan pengeluaran penduduk miskin semakin timpang dan semakin jauh dari garis kemiskinan itu sendiri.

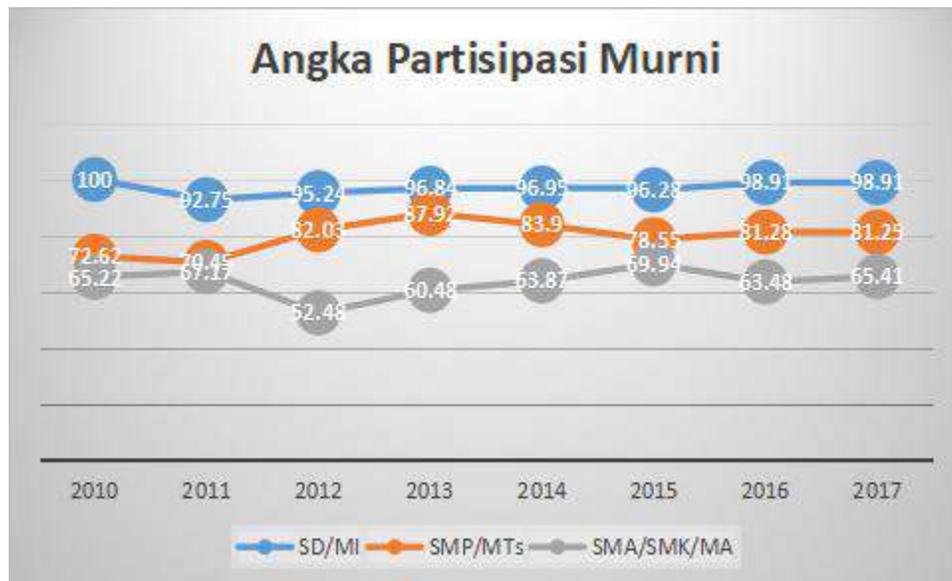
2.6. Indikator Pendidikan

Indikator pendidikan yang dipergunakan dalam evaluasi kebijakan umumnya berupa dua hal yaitu angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Secara teoritis APM akan selalu lebih rendah dibandingkan dengan APK. Dari aspek jenjang pendidikan, nilai APK maupun APM SD/MI selama 2010-2017 adalah yang tertinggi dibandingkan jenjang SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA. Nilai APK pada semua jenjang pendidikan selama 2010-2017 terlihat fluktuatif. Pola yang sama juga terjadi pada APM yang juga fluktuatif sepanjang 2010-2017. Bila diperbandingkan antar jenjang pendidikan, tidak terdapat pola yang sama. Hal ini disebabkan karena APK maupun APM dipengaruhi oleh struktur umur penduduk usia sekolah serta angka partisipasi sekolah. Nilai APK maupun APM Kota Surakarta ini tergolong tinggi dibandingkan daerah lain, meski bukan yang tertinggi.



Gambar 2.7. Angka Partisipasi Kasar Kota Surakarta 2010-2017

Sumber: BPS Kota Surakarta



Gambar 2.8. Angka Partisipasi Murni Kota Surakarta 2000-2015

Sumber: BPS Kota Surakarta

BAB III

KONSEP DAN METODE KAJIAN

3.1. Aspek Kependudukan dalam Pembangunan Daerah

Dalam konteks pembangunan di daerah, secara internal penduduk dapat dipandang dari dua sisi, yaitu kekuatan (potensi) atau kelemahan. Penduduk akan menjadi suatu kekuatan atau potensi pembangunan di daerah apabila penduduk di daerah tersebut mampu berperan secara aktif sebagai subyek pembangunan daerah. Untuk dapat berperan sebagai subyek pembangunan, penduduk haruslah memiliki kriteria minimal sebagai berikut: *pertama*, penduduk memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Hal ini dapat ditunjukkan antara lain melalui tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagai besar penduduk. Hasil studi empiris yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk berpengaruh secara signifikan dalam kemajuan atau pembangunan daerah. *Kedua*, penduduk memiliki rasio ketergantungan yang kecil, artinya struktur penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif diharapkan mampu memberikan kontribusi dan partisipasi yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Struktur penduduk yang didominasi oleh usia tidak produktif (anak-anak dan orang tua atau manula) dapat menghambat progresivitas pembangunan daerah. *Ketiga*, laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mendorong semakin besarnya beban rumah tangga melalui tingginya tingkat konsumsi terutama makanan. Hal ini akan menjadikan lambatnya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan yang diharapkan.

Penduduk merupakan pusat dari kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan penduduk merupakan permasalahan pembangunan dalam jangka panjang dan permasalahan tersebut membawa implikasi yang luas dalam pembangunan daerah. Atas dasar hal tersebut, penting bagi daerah untuk merumuskan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Pembangunan berwawasan kependudukan berorientasi pada pendekatan '*bottom-up planning*'. Melalui pendekatan ini, tujuan utama seluruh proses pembangunan adalah lebih memeratakan kesejahteraan penduduk daripada mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena itu pendekatan '*bottom-up*' berupaya mengoptimalkan penyebaran sumberdaya yang dimiliki dan potensial ke seluruh wilayah dan membangun sesuai

dengan potensi dan masalah khusus yang dihadapi oleh daerah masing-masing. Pendekatan *bottom-up* mengisyaratkan kebebasan daerah atau wilayah untuk merencanakan pembangunan sendiri sesuai dengan keperluan dan keadaan daerah masing-masing. Oleh karena itu otonomi yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masing-masing daerah agar mampu mengatur dan menjalankan berbagai kebijaksanaan yang dirumuskan sendiri guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah atau kawasan yang bersangkutan. Melalui otonomi daerah, yang berarti adalah desentralisasi pembangunan, maka laju pertumbuhan antar daerah akan semakin seimbang dan serasi, sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya semakin merata di seluruh Indonesia.

Terdapat beberapa ciri kependudukan di masa mendatang yang harus dicermati dalam konteks pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ciri-ciri kependudukan tersebut antara lain:

1. Penduduk di masa depan akan semakin tinggi pendidikannya.

Penduduk yang makin berpendidikan dan sehat akan membentuk sumber daya manusia yang makin produktif. Tantangannya adalah menciptakan lapangan kerja yang memadai. Sebab bila tidak, jumlah penganggur yang makin berpendidikan akan bertambah. Keadaan ini dengan sendirinya merupakan pemborosan terhadap investasi nasional. Karena sebagian besar dana tercurah dalam sektor pendidikan, disamping kemungkinan terjadinya implikasi sosial lainnya yang mungkin timbul.

2. Penduduk yang makin sehat dan angka harapan hidup naik.

Usia harapan hidup yang tinggi dan jumlah penduduk lanjut semakin besar akan juga menuntut kebijaksanaan-kebijaksanaan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Suatu tantangan pula untuk dapat memanfaatkan penduduk usia lanjut yang masih potensial agar dapat dimanfaatkan sesuai pengetahuan dan pengalamannya.

3. Penduduk akan bergeser ke usia yang lebih tua.

Pada saat ini telah terjadi proses transisi umur penduduk Indonesia dari penduduk muda ke penduduk tua (*ageing process*). Pergeseran struktur umur muda ke umur tua produktif akan membawa konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan terutama pendidikan tinggi dan kesempatan kerja. Sedang pergeseran struktur umur produktif ke umur tua pada akhirnya akan mempunyai dampak terhadap persoalan penyantunan penduduk usia lanjut. Bersamaan dengan perubahan sosial

ekonomi diperkirakan akan terjadi pergeseran pola penyantunan usia lanjut dari keluarga kepada institusi. Apabila hal ini terjadi, maka tanggung jawab pemerintah akan semakin berat.

4. Penduduk yang tinggal di perkotaan semakin banyak.

Seiring dengan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat, presentase penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat dari tahun ke tahun. Masalah urbanisasi akan menjadi masalah yang semakin menonjol. Penduduk perkotaan akan bertambah terus sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, tuntutan fasilitas perkotaan akan bertambah pula. Tambahan volume fasilitas perkotaan akan sangat berpengaruh terhadap keadaan dan perkembangan fisik kota yang bersangkutan. Meningkatnya sarana perhubungan dan komunikasi antar daerah, termasuk di daerah perdesaan, menyebabkan orang dari perdesaan tidak perlu lagi melakukan migrasi dan berdiam di daerah perkotaan. Mereka cukup menuju daerah perkotaan manakala diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dalam kurun waktu harian, mingguan, bahkan bulanan. Dengan semakin berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi, pola mobilitas penduduk seperti itu akan semakin banyak dilakukan, sementara migrasi permanen cenderung akan makin menurun.

5. Jumlah rumah tangga akan meningkat namun ukurannya makin kecil.

Perubahan pola kelahiran dan kematian akan berpengaruh pada struktur rumahtangga. Dimasa depan ukuran rumah tangga akan semakin mengecil, namun jumlahnya akan semakin banyak. Dengan makin sedikitnya jumlah anak yang dimiliki dan disertai dengan peningkatan kesehatan penduduk, seiring tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih baik, memberikan kesempatan pula bagi individu maupun keluarga untuk melakukan mobilitas ke daerah lain.

6. Intensitas mobilitas penduduk yang makin tinggi.

Mobilitas penduduk yang makin tinggi baik secara internal maupun internasional menuntut jaringan prasarana yang makin baik dan luas. Selain itu akan membawa kepada pergeseran norma-norma masyarakat, seperti ikatan keluarga dan kekerabatan. Kesemuanya ini dapat membawa dampak yang berjangka panjang terhadap perubahan sosial budaya masyarakat.

7. Masih tingginya pertumbuhan angkatan kerja.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan kerjanya pun cukup tinggi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja tersebut di satu pihak menuntut kesempatan kerja yang lebih besar. Di pihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri agar mampu menghasilkan keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas.

8. Terjadi perubahan lapangan kerja.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, lapangan pekerjaan penduduk berubah dari yang bersifat primer, seperti pertanian, pertambangan, menuju lapangan pekerjaan sekunder atau bangunan. Lalu pada akhirnya akan menuju lapangan kerja tersier atau sektor jasa. Berbagai ciri dan fenomena di atas sudah sepantasnya diamati secara seksama, dalam rangka menetapkan alternatif kebijaksanaan selanjutnya.

Berdasarkan ciri-ciri kependudukan di masa mendatang, maka perlu dirumuskan *grand design* kependudukan. *Grand design* ini diperlukan khususnya untuk mendukung keberhasilan pembangunan. *Grand design* meliputi tiga aspek yaitu: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, serta pembangunan keluarga. Aspek ketiga merupakan aspek yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui penguatan pembangunan karakter di keluarga.

3.2. Pengangguran, Kemiskinan, Pembangunan Ekonomi Lokal

Masalah kependudukan yang seringkali dihadapi adalah masalah yang berkaitan erat dengan pengangguran. Pengangguran sendiri muncul akibat dari kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan penawaran tenaga kerja. Tingginya penawaran kerja diakibatkan oleh meningkatnya angkatan kerja, sedangkan peningkatan angkatan kerja merupakan dampak dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Dalam angkatan kerja, jumlah penduduk yang tidak bekerja mencerminkan tingkat pengangguran yang terjadi. Pengangguran yang terjadi di suatu daerah berdampak pada tingkat kemiskinan karena kebutuhan hidup tidak dapat dipenuhi akibat tidak tersediannya lapangan kerja. Oleh karena itu semakin

meningkatnya proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas perlu diperhatikan, mengingat hal ini dapat mendorong terjadinya pengangguran apabila penduduk 15 tahun ke atas tersebut tidak bersekolah dan tidak bekerja. Pengangguran yang terjadi memiliki dampak langsung terhadap kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas aspek kehidupan. Ahli ekonomi Amartya K. Sen menyatakan, kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan mencapai standar hidup.

Salah satu strategi mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang banyak ditempuh oleh suatu negara berkembang adalah pengembangan ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi kerakyatan bukanlah berarti menutup pengembangan sektor industri, perdagangan, maupun sektor jasa yang berskala besar, namun pengertian pengembangan ekonomi kerakyatan adalah upaya pemberdayaan masyarakat secara luas dan nyata dalam aktivitas ekonomi berdasarkan pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal yang didukung dengan sumberdaya manusia yang terampil. Pengembangan potensi ekonomi lokal tersebut diarahkan pada pengembangan skala usaha yang lebih besar, sehingga tercipta keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang (*forward* dan *backward linkage*).

Pembangunan ekonomi lokal menurut Bank Dunia (2001) adalah “..*the process by which actors within cities and towns – our community – works collectively with public, business and non governmental sektor partners to create better conditions for economic growth and employment generation.*”. Definisi ini mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi lokal: (1) melibatkan interaksi komponen masyarakat, (2) bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Lebih lanjut Bank Dunia mengatakan bahwa untuk mengembangkan ekonomi lokal, daerah perlu fokus pada: (1) penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, (2) pengembangan sumberdaya manusia, (3) kemitraan masyarakat dan pemerintah, (4) mendorong investasi swasta ke barang publik, dan (5) membangun daya saing lokasi.

Pengertian lain dari ekonomi lokal dikemukakan oleh Blakely dan Bradshaw, yaitu proses dimana pemerintah daerah dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut International Labour Organization (ILO), pembangunan ekonomi lokal adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan

pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya local dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.

Definisi ekonomi lokal menurut Helming adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu, menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik.

Pengembangan ekonomi lokal menurut Yoga (Bappenas, 2007) memfokuskan kepada:

1. Peningkatan kandungan lokal;
2. Pelibatan *stakeholders* secara substansial dalam suatu kemitraan strategis;
3. Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi;
4. Pembangunan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal;
6. Pengembangan usaha kecil dan menengah;
7. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif;
8. Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
9. Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah;
10. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.

Sasaran dari pengembangan ekonomi lokal pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif.
2. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara *stakeholder* secara sinergis.
3. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal.

4. Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan.
5. Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB.
6. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan.
7. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah.
8. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

Atas dasar hal tersebut di atas, pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka pembedayaan ekonomi masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, dengan penekanan pada keterlibatan masyarakat, partisipasi pemerintah daerah, serta pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

3.3. Kependudukan dan Pertumbuhan Ekonomi

Penduduk terbagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Pengertian “bekerja” menurut BPS adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Menurut BPS, penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung dengan cara:

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Menurut hukum Okun (Okun's Law) pengangguran memiliki hubungan negative dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin rendah tingkat pengangguran yang terjadi. Output dari perekonomian tergantung dari tenaga kerja yang dipergunakan dalam proses produksi sehingga terdapat hubungan positif antara output dengan tenaga kerja. Mengingat angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka, maka semakin tinggi output semakin tinggi jumlah penduduk yang bekerja dan semakin rendah pengangguran.

Namun penelitian hubungan antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak berdiri sendiri, namun juga dipengaruhi variable lain seperti pengeluaran pemerintah, kebijakan ekonomi dan keuangan, dan sebagainya. Artinya, pertumbuhan ekonomi misal 2% tidak secara otomatis akan mengurangi tingkat pengangguran 2% pula.

3.4. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari.

Kondisi kemiskinan menurut BPS dapat diukur dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan

(*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Berbagai studi yang dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan, seperti Ravallion dan Chen (1997)¹ serta Adam (2002)². Penelitian lain seperti Lin di China (2008)³ dan HBhanumurthy dan HMitra (2004)⁴ di India juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Kemiskinan sendiri dikenal dalam dua bentuk, kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. BPS memberikan pengertian bahwa kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkanakan tetapi (lebih lanjut dari itu!) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Di dalam kondisi struktur yang

¹ Ravallion, M dan S Chen (1997) 'What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in Distribution and Poverty?' World Bank Economic Review. Vol. 11(2).

² Adams, R (2002) Economic Growth, Inequality and Poverty: Findings from a New Data Set, Policy Research Working Paper 2972, World Bank, February 2002.

³ Lin (2003), Economic Growth, Income Inequality, and Poverty Reduction in People's Republic of China, Asian Development Review, vol. 20, no. 2.

⁴ HBhanumurthy and HMitra (2004), Economic Growth, Poverty, and Inequality in Indian States in the Pre-reform and Reform Periods, Asian Development Review, vol. 21, no. 2

demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia.

Selanjutnya dikatakan bahwa kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogianya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.

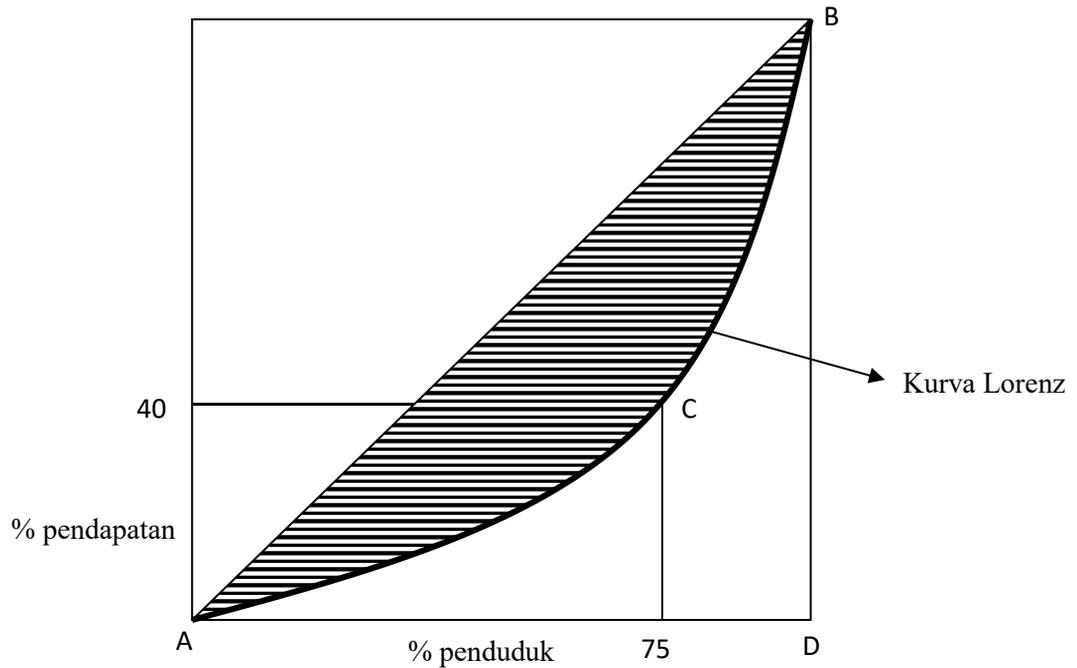
Berdasarkan uraian di atas, kemiskinan dalam berbagai bentuk dan pengertiannya merupakan masalah yang dapat muncul setiap saat sepanjang waktu di setiap daerah. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal, baik karena proses pembangunan itu sendiri maupun karena struktur dan kultur masyarakat.

3.5. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan per kapita diukur dengan cara membagi PDB atau PNB dengan jumlah penduduk. PDB atau PNB yang dipergunakan bisa berupa PDB atau PNB riil (atas dasar harga konstan), bisa pula PDB atau PNB harga berlaku. Jumlah penduduk yang dipergunakan adalah jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pendapatan per kapita dipergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah secara umum. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi pula kemakmuran penduduk wilayah tersebut. Pendapatan perkapita tidak memiliki hubungan dengan tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, artinya Negara yang pendapatan perkapita nya tinggi, bisa saja ketimpangannya juga tinggi. Bila hal tersebut terjadi, berarti struktur ekonomi wilayah tersebut masih tergantung pada sekelompok masyarakat tertentu. Analisis ketimpangan diperlukan mengingat apakah hasil pembangunan daerah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan lebih adil. Bila indeks ini semakin baik maka tingkat kesejahteraan masyarakat baik antar individu dan wilayahnya akan semakin membaik pula.

Ketimpangan diukur dengan menggunakan Gini Ratio, yang diturunkan dari Kurva Lorenz. Semakin tinggi nilai Gini Ratio, berarti kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal, dan distribusi pendapatan semakin semakin tidak merata (ketimpangan semakin tajam).



Gambar 3.1. Kurva Lorenz

Contoh di atas: 75% penduduk menguasai 40% pendapatan (berarti 25% penduduk menguasai 60% pendapatan). Koefisien Gini= ABC/ABD.

Selain itu ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar wilayah dapat diukur dengan indeks Williamson sebagai berikut:

$$\text{Indeks Williamson (IW)} = \left\{ \frac{\sum (Y - Y_i)^2 F_i / N}{Y^2} \right\}^{0,5}$$

Dimana:

Y = income riil per kapita kabupaten/kota

Y_i = income perkapita kecamatan

F_i = jumlah penduduk kecamatan

N = jumlah penduduk kabupaten/kota

Dari analisis ini selanjutnya dapat pula dibuat tipologi klasen 4 kuadran

- Ketimpangan tinggi dan kemiskinan tinggi
- Ketimpangan tinggi dan kemiskinan rendah
- Ketimpangan rendah dan kemiskinan tinggi
- Ketimpangan rendah dan kemiskinan rendah

Teori tentang ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dikemukakan oleh Kuznets yang menunjukkan bahwa hubungan antara ketimpangan dengan pendapatan per kapita membentuk kurva U terbalik (inverted U shape). Pada intinya, teori tersebut menyatakan bahwa ketimpangan mula-mula akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, hingga pada tahap tertentu ketimpangan akan menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hipotesis Kuznets tersebut tidak berlaku mutlak karena karakteristik yang berbeda antar wilayah. Selain itu, ketimpangan juga terkait dengan banyak hal.

Ketimpangan berkaitan dengan pengangguran dan kemiskinan, dan dalam hal ini pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan kemiskinan sedangkan syarat kecukupannya (sufficient condition) adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut harus menyebar di setiap golongan baik secara langsung maupun tak langsung. Secara langsung mengandung arti bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi di sektor-sektor yang di dalamnya banyak penduduk berpenghasilan rendah yang bekerja. Secara tidak langsung mengandung arti bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mendistribusikan pertumbuhan ekonomi dari sektor lain yang tidak didominasi penduduk berpenghasilan rendah ke golongan penduduk yang berpenghasilan rendah.

3.6. Konsentrasi Kemiskinan

Untuk melihat bagaimana pola konsentrasi kemiskinan di Indonesia digunakan indeks Entropy Theil. Kelebihan indeks Entropy Theil dibandingkan dengan indeks konsentrasi spasial lainnya adalah bahwa pada suatu titik waktu, indeks ini menyediakan ukuran derajat konsentrasi (ataupun dispersi) distribusi spasial pada sejumlah daerah dan sub daerah dalam suatu negara.

Nilai indeks Entropy Theil yang lebih rendah menunjukkan kesenjangan yang lebih rendah, dan sebaliknya. Karakteristik utama dari indeks Entropy Theil ini adalah kemampuannya untuk membedakan kesenjangan antar daerah (between-region inequality) dan kesenjangan dalam satu daerah (withinregion inequality)

Indeks Theil dirumuskan sebagai berikut:

$$IT = \sum (x_j / X) x \text{Log} \left(\frac{x_j / X}{y_j / Y} \right)$$

Keterangan:

IT=Indeks Entropi Theil

x_j =jumlah penduduk miskin di wilayah (kecamatan)

X =rata-rata jumlah penduduk miskin di Kota Surakarta

y_j =jumlah penduduk di wilayah (kecamatan)

Y =Jumlah penduduk di Kota Surakarta

Intensitas kemiskinan juga merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan di suatu daerah. Menurut KPPOD Departemen Daam Negeri, kriteria tingkat keparahan kemiskinan dinyatakan sebagai berikut:

Sangat Tinggi : apabila $I \leq \text{mean} + Sd$

Tinggi : apabila $\text{mean} + 0,5Sd \leq I < \text{mean} + Sd$

Sedang : apabila $\text{mean} - 0,5Sd \leq I < \text{mean} + 0,5Sd$

Rendah : apabila $I < \text{mean} - 0,5Sd$

Dalam hal ini, I =indikator tertentu yang dipergunakan (misal Gini Ratio, Indeks Williamson, atau Indeks Theil), mean =rata-rata hitung, Sd =deviasi standar.

3.7. Metodologi

3.7.1. Pendekatan Kajian

Untuk menghitung Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil dibutuhkan data PDRB dan kemiskinan di kecamatan. Data PDRB kecamatan dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan proporsi

PDRB kecamatan saat ini diproxy berdasarkan PDRB kecamatan tahun yang sebelumnya. Bila misal PDRB Tahun 2011 adalah 100 milyar, maka akan ditentukan proporsi PDRB tersebut di masing-masing kecamatan. Selanjutnya proporsi tersebut dipergunakan sebagai proxy PDRB tahun-tahun mendatang

b. Pendekatan Konsumsi Rumah Tangga

Dalam pendekatan pengeluaran atau penggunaan, PDRB merupakan penjumlahan dari konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nirlaba, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal tetap domestic bruto, perubahan inventori dan ekspor netto. Peranan konsumsi rumah tangga cukup besar dalam PDRB, sehingga pendekatan konsumsi rumah tangga dapat dijadikan dasar untuk mengestimasi PDRB level kecamatan sebagai berikut:

$$\text{PDRB Kecamatan} = \text{Share konsumsi kecamatan}/100 \times \text{PDRB Kota Surakarta}$$

c. Pendekatan Penduduk yang Bekerja

PDRB menurut produksi mengandung makna bahwa PDRB merupakan total seluruh nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi, sementara tenaga kerja merupakan salah satu factor yang mempengaruhi produksi selain modal dan teknologi. Suplai dari tenaga kerja adalah penduduk, yang dalam hal ini merupakan penduduk usia kerja. Dengan demikian, untuk mengestimasi PDRB level kecamatan dengan menganggap faktor selain tenaga adalah *ceteris paribus*, sehingga hanya factor tenaga kerja yang berpengaruh terhadap output produksi dan faktor lainnya konstan. Atas dasar hal tersebut PDRB di tingkat kecamatan diproxy dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PDRB Kecamatan} = \text{Share jumlah penduduk kecamatan yang bekerja}/100 \times \text{PDRB Kota Surakarta}$$

Dalam hal jumlah penduduk yang bekerja di tingkat kecamatan tidak tersedia, proxy dilakukan dengan menggunakan share jumlah penduduk masing-masing kecamatan.

3.7.2. Sumber dan Ketersediaan Data

Data dalam kajian ini bersumber dari BPS Kota Surakarta berupa Kota Surakarta Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, serta PDRB Kota Surakarta. Ketersediaan data adalah sebagai berikut:

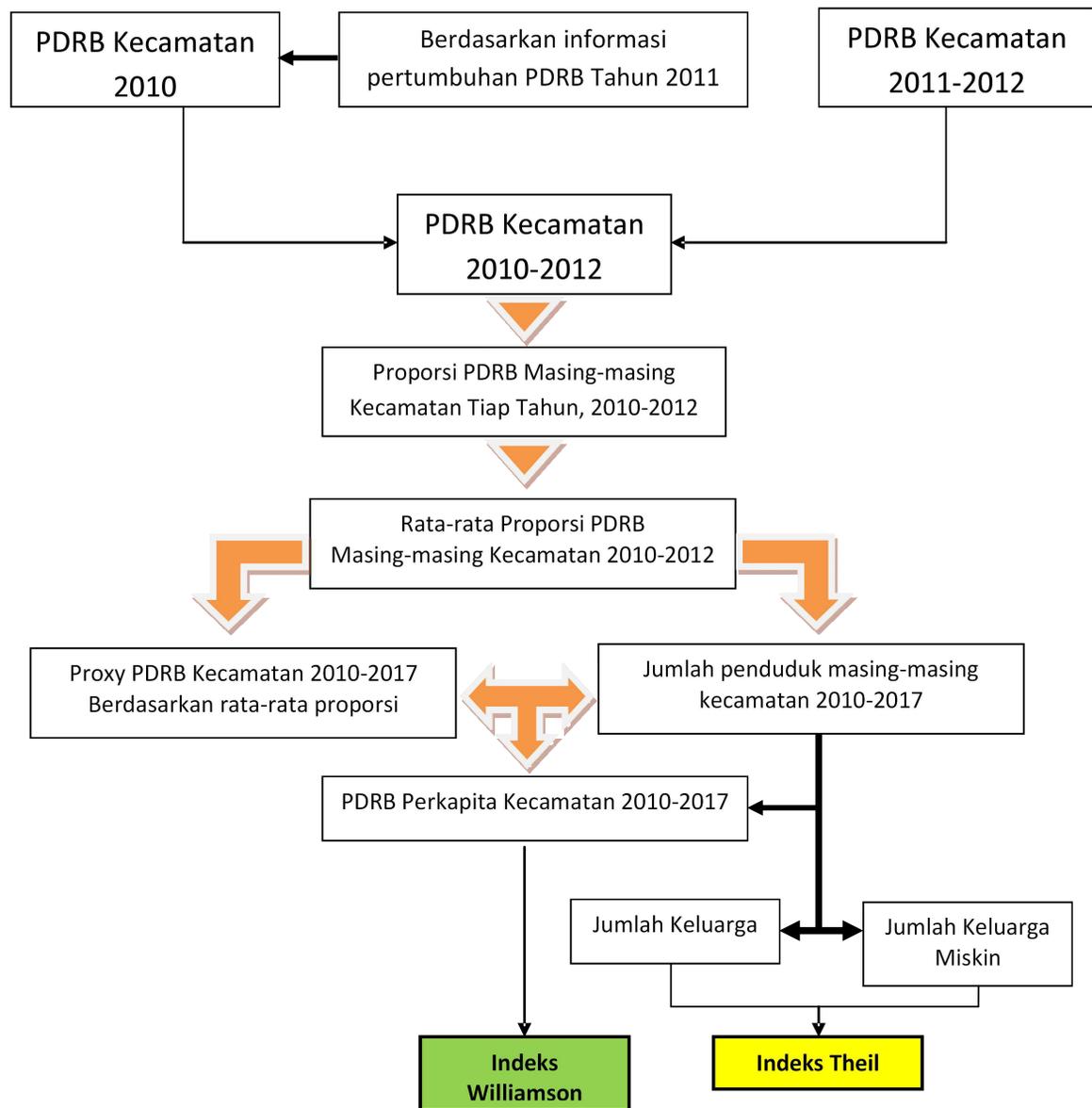
- a. PDRB Kecamatan Tahun 2011 dan 2012
- b. PRDB Kecamatan Tahun 2010 (*berdasarkan data pertumbuhan PDRB di tahun 2011*)
- c. Jumlah penduduk per kecamatan
- d. Jumlah keluarga miskin (prasejahtera) per kecamatan (Kota Surakarta Dalam Angka)

Berdasarkan ketersediaan data di atas, pendekatan yang dipergunakan adalah: (1) pendekatan proporsi PDRB dan (2) pendekatan proporsi jumlah penduduk. Untuk pendekatan proporsi PDRB, pendekatan ini memiliki asumsi bahwa proporsi PDRB per kecamatan selama 2010-2017 adalah sama, berdasarkan pertimbangan perhitungan deviasi standar dan koefisien variasi yang kecil.

3.7.3. Prosedur Penentuan PDRB Kecamatan

- Pendekatan Proporsi PDRB
 - a. Pertama, dilakukan pengolahan data untuk memperoleh informasi PDRB Kecamatan Tahun 2010-2012 sesuai dengan ketersediaan data.
 - b. Kedua, dilakukan penghitungan proporsi PDRB masing-masing kecamatan selama 2010-2012.
 - c. Ketiga, dilakukan penghitungan rata-rata proporsi PDRB masing-masing kecamatan selama 2010-2012.
 - d. Keempat, penggunaan rata-rata proporsi PDRB masing-masing kecamatan untuk proxy PDRB kecamatan.
- Pendekatan Proporsi Jumlah Penduduk
 - a. Pertama, dilakukan penghitungan proporsi penduduk per kecamatan terhadap jumlah penduduk Kota Surakarta selama 2010-2017.
 - b. Kedua, dilakukan prpxy PDRB Kecamatan dengan cara proporsi jumlah penduduk per kecamatan dikalikan PDRB Kota Surakarta selama 2010-2017

3.7.4. Kerangka Pikir Kajian



Gambar 3.2. Kerangka Pemikiran

3.8. Hasil Pengolahan Data

Tabel 3.1. Pertumbuhan Ekonomi (%)

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
1	Surakarta	6,42	5,58	6,17	5,24	5,44	5,32	5,33	5,41	5,60
2	Provinsi Jawa Tengah	5,30	5,34	5,14	5,42	5,40	5,26	5,27	5,32	5,31
3	Indonesia	6,50	6,23	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17	5,40
4	Rata-rata Jawa Tengah	5,61	5,09	5,42	5,07	5,43	5,37	5,11	5,30	5,30

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3.2. Angka Harapan Hidup (AHH)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
1	Surakarta	72,16	72,25	72,35	76,97	76,99	77,00	77,03	77,06	77,11	0,83
2	Provinsi Jawa Tengah	72,73	72,91	73,09	73,28	73,88	73,96	74,02	74,08	74,18	0,25
3	Indonesia	69,81	70,01	70,20	70,40	70,59	70,78	70,90	71,06	71,2	0,25
4	Rata-rata Jawa Tengah	74,17	74,24	74,30	74,37	74,41	74,50	74,56	74,63	74,69	0,09

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3.3. Harapan Lama Sekolah

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
1	Surakarta	13,17	13,34	13,5	13,64	13,92	14,14	14,5	14,51	14,52	1,23
2	Provinsi Jawa Tengah	11,09	11,18	11,39	11,89	12,17	12,38	12,45	12,57	12,63	1,64
3	Indonesia	11,29	11,44	11,68	12,10	12,39	12,55	12,72	12,85	12,91	1,69
4	Rata-rata Jawa Tengah	11,21	11,41	11,63	11,90	12,19	12,46	12,59	12,72	12,74	1,62

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3.4. Rata-rata Lama Sekolah

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
1	Surakarta	9,99	10,05	10,11	10,25	10,33	10,36	10,37	10,38	10,53	0,66
2	Provinsi Jawa Tengah	6,71	6,74	6,77	6,80	6,93	7,03	7,15	7,27	7,35	1,15
3	Indonesia	7,46	7,52	7,59	7,61	7,73	7,84	7,95	8,10	8,17	1,14
4	Rata-rata Jawa Tengah	6,74	6,85	6,96	7,11	7,24	7,37	7,45	7,58	7,57	1,46

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3.5. Pengeluaran per kapita (Rp ribuan)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
1	Surakarta	12.123	12.464	12.680	12.820	12.907	12.604	13.900	13.986	14.528	2,29
2	Provinsi Jawa Tengah	8.992	9.296	9.497	9.618	9.640	9.930	10.153	10.377	10.777	2,29
3	Indonesia	9.437	9.647	9.815	9.858	9.903	10.150	10.420	10.664	11.059	2,00
4	Rata-rata Jawa Tengah	9.012	9.296	9.497	9.618	9.655	9.938	10.181	10.414	10.837	2,33

Sumber: Badan Pusat Statistik

BAB 4

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. ANALISIS EVALUASI PEREKONOMIAN KOTA SURAKARTA

4.1.1. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Surakarta pada tahun 2010 mencapai Rp21,49 trilyun dan pada tahun 2018 naik lebih dari dua kali lipat menjadi Rp44,2 trilyun. Kenaikan terbesar dari 2010 ke 2018 adalah sektor jasa pendidikan dari Rp785 milyar menjadi Rp2,4 trilyun atau naik sebesar 206,6%. Peringkat kedua adalah sektor jasa perusahaan yang naik sebesar 168,3% dan yang ketiga adalah sektor penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 133,7%. Sektor yang memiliki kenaikan terkecil dari 2010 ke 2018 adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan kenaikan sebesar 37,1%.

Tabel 4.1. PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2010 dan 2018

Lapangan Usaha	2010	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	107,625.81	218,581.70
Pertambangan dan Penggalian	599.04	821.67
Industri Pengolahan	1,636,047.97	3,722,201.87
Pengadaan Listrik dan Gas	47,061.77	89,447.76
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	48,303.14	64,143.46
Konstruksi	6,060,192.51	12,034,092.39
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,113,356.59	9,855,318.19
Transportasi dan Pergudangan	566,181.32	1,129,336.51
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,044,929.32	2,442,524.86
Informasi dan Komunikasi	2,439,338.58	5,047,573.52
Jasa Keuangan dan Asuransi	783,042.54	1,705,170.51
Real Estate	907,497.62	1,762,265.00
Jasa Perusahaan	136,373.29	365,915.59
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,387,544.33	2,466,705.65
Jasa Pendidikan	785,767.73	2,409,153.87
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	183,228.09	497,578.89
Jasa lainnya	222,461.64	415,459.08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	21,469,551.30	44,226,290.53

Dari strukturnya, pada tahun 2018 PDRB Surakarta didominasi oleh kontribusi sektor konstruksi sebesar 27,16%, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 22,4%, serta sektor informasi dan komunikasi sebesar 11,39%. Sementara itu

pertumbuhan tahun 2018 untuk sektor konstruksi adalah 9,72%, sektor perdagangan besar dan eceran 6,99%, dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,85%. Proporsi dan pertumbuhan ketiga sektor tersebut cukup besar dan menopang lebih dari 50% PDRB Surakarta. Beberapa sektor yang menunjukkan pertumbuhan tinggi di atas 7% pada tahun 2018 namun memiliki proporsi kecil adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pengadaan listrik dan gas, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dengan demikian sektor jasa di Surakarta memiliki perkembangan yang sangat prospektif.

Bila diperbandingkan kondisi 2010 dan 2018, berdasarkan perhitungan harga berlaku, hanya sektor informasi dan komunikasi yang memiliki kenaikan proporsi sekaligus kenaikan pertumbuhan. Bila menggunakan pendekatan harga konstan, terdapat beberapa sektor yang memiliki kenaikan baik dari sisi proporsi maupun pertumbuhan dari 2010 ke 2018, yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa perusahaan, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Tabel 4.2. Proporsi dan Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 dan 2018

Lapangan Usaha	Proporsi		Pertumbuhan		Proporsi	Pertumbuhan
	2010	2018	2010	2018	2010-2018	2010-2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.50	0.49	13.05	7.01	Turun	Turun
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	3.28	2.68	Turun	Turun
Industri Pengolahan	7.62	8.40	11.01	6.99	Naik	Turun
Pengadaan Listrik dan Gas	0.22	0.20	8.61	8.27	Turun	Turun
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.22	0.14	4.81	4.45	Turun	Turun
Konstruksi	28.23	27.16	13.70	9.72	Turun	Turun
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23.82	22.24	10.25	6.99	Turun	Turun
Transportasi dan Pergudangan	2.64	2.70	9.03	6.77	Naik	Turun
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.87	5.67	9.47	4.58	Naik	Turun
Informasi dan Komunikasi	11.36	11.39	7.89	10.85	Naik	Naik
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.65	3.86	9.89	7.08	Naik	Turun
Real Estate	4.23	3.98	13.00	5.32	Turun	Turun
Jasa Perusahaan	0.64	0.83	13.98	11.43	Naik	Turun
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.46	5.57	10.35	4.94	Turun	Turun
Jasa Pendidikan	3.66	5.32	10.02	7.64	Naik	Turun
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.85	1.11	10.44	8.59	Naik	Turun

Jasa lainnya	1.04	0.93	11.30	5.87	Turun	Turun
PDRB	100.00	100.00	11.04	7.90	Naik	Turun

Tabel 4.3. Proporsi dan Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan 2018

Lapangan Usaha	Proporsi		Pertumbuhan		Proporsi	Pertumbuhan
	2010	2018	2010	2018	2010-2018	2010-2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.50	0.43	2.35	3.98	Turun	Naik
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	-0.13	-1.58	Turun	Turun
Industri Pengolahan	7.62	7.63	4.38	3.76	Naik	Turun
Pengadaan Listrik dan Gas	0.22	0.23	4.21	4.99	Naik	Naik
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.22	0.17	6.54	4.11	Turun	Turun
Konstruksi	28.23	26.08	6.72	5.07	Turun	Turun
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23.82	23.33	6.06	4.66	Turun	Turun
Transportasi dan Pergudangan	2.64	2.89	4.89	5.69	Naik	Naik
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.87	5.01	5.49	3.82	Naik	Turun
Informasi dan Komunikasi	11.36	14.34	6.09	10.86	Naik	Naik
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.65	3.39	7.15	3.36	Turun	Turun
Real Estate	4.23	4.31	5.80	2.54	Naik	Turun
Jasa Perusahaan	0.64	0.76	8.00	8.42	Naik	Naik
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.46	5.21	6.03	3.02	Turun	Turun
Jasa Pendidikan	3.66	4.19	7.20	5.16	Naik	Turun
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.85	1.05	4.67	7.22	Naik	Naik
Jasa lainnya	1.04	0.97	6.61	4.84	Turun	Turun
PDRB	100.00	100.00	6.11	5.38		Turun

Bila PDRB ditinjau dari sisi pengeluaran atau penggunaan, proporsi investasi terhadap PDRB selama 2010-2017 terlihat relative konstan namun proporsinya cukup besar. Hal ini berarti peran investasi dalam pembentukan PDRB Surakarta sangat strategis dan kinerja investasi meski secara absolut atau nominal meningkat namun dari sisi rasio terhadap PDRB cenderung stagnan. Untuk rasio ekspor terhadap PDRB, selama 2010-2017 terlihat rasionya menunjukkan kecenderungan yang meningkat, dan di sisi lain rasio impor terhadap PDRB selama 2010-2017 terlihat cenderung menurun. Dengan demikian, struktur PDRB dari sisi pengeluaran menunjukkan kinerja yang baik. Rasio perdagangan terhadap PDRB cenderung konstan namun rasio industri terhadap PDRB terlihat menunjukkan tren yang meningkat meskipun kecil.

Tabel 4.4. Rasio Terhadap PDRB

Jenis Rasio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ekspor Terhadap PDRB	30.20	33.54	36.48	35.17	35.59	34.28	32.78	34.85	n.a.
Impor Terhadap PDRB	60.40	67.08	72.97	70.30	70.43	66.80	63.48	34.85	n.a.
Investasi Terhadap PDRB	67.36	66.46	66.40	66.38	67.55	66.89	66.21	66.60	n.a.
Perdagangan Terhadap PDRB	23.82	24.42	23.34	23.52	22.79	22.56	22.49	22.43	22.24
Industri Terhadap PDRB	7.62	8.08	8.27	8.39	8.70	8.58	8.55	8.47	8.40

Sumber: BPS Surakarta.

PDRB atas dasar harga konstan merupakan PDRB riil dan bila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, akan menghasilkan informasi PDRB perkapita riil. Dari indikator ini, Surakarta memiliki PDRB perkapita riil yang jauh di atas provinsi Jawa Tengah dan nasional yaitu Rp61.156.478 perkapita per tahun dengan rata-rata pertumbuhan per tahun selama 2010-2017 sebesar 5,19%. Tingginya PDRB perkapita riil Surakarta ini disebabkan karena Surakarta mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk namun tetap mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rata-rata pertumbuhan penduduk Surakarta per tahun selama 2010-2018 hanya sebesar 0,44% sementara untuk provinsi Jawa Tengah adalah 0,77% dan di tingkat nasional adalah 1,33%.

Tabel 4.5. Perbandingan PDRB Perkapita Riil Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
1	Surakarta	42,920,990	45,435,805	47,731,963	50,476,137	52,899,616	55,548,711	58,280,947	61,156,478	5.19
2	Provinsi Jawa Tengah	19,209,309	20,053,798	20,950,622	21,844,869	22,819,164	23,887,065	24,959,493	26,088,912	4.47
3	Indonesia	28,778,164	30,115,353	31,484,474	32,780,966	33,965,354	35,161,894	36,468,616	37,850,508	3.99
4	Rata-rata Jawa Tengah	19,963,164	20,894,776	21,749,939	22,729,694	23,679,548	24,745,831	25,874,698	26,960,510	4.39

Sumber: BPS Jawa Tengah.

Tabel 4.6. Perbandingan PDRB Perkapita Riil Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah

Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
Magelang	33,867,443.92	35,760,965.74	37,551,652.05	39,665,764.67	41,449,648.96	43,441,132.42	45,566,785.55	47,782,340.23	5.04
Surakarta	42,920,989.93	45,435,804.70	47,731,962.52	50,476,136.80	52,899,615.98	55,548,710.66	58,280,947.40	61,156,477.72	5.19
Salatiga	34,245,751.45	35,934,521.26	37,359,762.59	39,106,337.32	40,694,319.02	42,211,906.63	43,793,266.59	45,461,813.70	4.13
Semarang	51,809,888.74	54,228,750.51	56,469,141.90	58,980,135.93	61,631,945.43	64,140,727.55	66,789,986.07	69,409,690.00	4.27
Pekalongan	16,397,038.77	17,116,955.15	17,888,179.29	18,756,069.48	19,594,584.82	20,388,037.02	21,279,427.86	22,215,783.96	4.43
Tegal	28,731,540.32	30,421,670.95	31,520,553.26	33,145,316.03	34,661,583.35	36,380,285.78	38,187,996.43	40,128,310.15	4.89

Sumber: BPS Jawa Tengah.

4.1.2. Inflasi

Selama 2010-2018 inflasi di Surakarta terlihat cukup fluktuatif. Selama periode tersebut inflasi terendah terjadi pada tahun 2011 yang mencapai hanya 1,93% dan yang tertinggi adalah tahun 2013 yang mencapai 8,32%. Penurunan inflasi yang sangat tajam terjadi pada tahun 2015, yaitu dari 8,01% di tahun 2014 menjadi 2,56% di tahun 2015.



Gambar 4.1. Perkembangan Laju Inflasi 2010-2018

Dilihat dari kelompok barang dan jasa, kelompok transportasi, komunikasi, dan keuangan memberikan kontribusi besar terhadap inflasi di Kota Surakarta. Selain itu kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta kelompok kesehatan juga memberikan andil besar dalam inflasi di Surakarta. Kelompok bahan makanan pada tahun 2017 terlihat mengalami deflasi sebesar 0,99% sementara

kelompok kesehatan serta transport, komunikasi, dan keuangan menunjukkan inflasi yang cukup tinggi di tahun 2017 tersebut.

Tabel 4.7. Perkembangan Laju Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang

Kelompok Barang Jasa	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Umum	6.65	1.93	2.87	8.32	8.01	2.56	3.15	3.1	2.45
Bahan Makanan	6.25	21.6	-2.02	3.14	12.49	4.1	3.94	-0.99	2.13
Makanan Jadi, Minuman Rokok & Tembakau	3.21	5.36	4.4	4.15	3.62	2.98	2.62	2.53	3.45
Perumahan	1.56	2.74	2.07	3.65	8.91	3.2	2.16	3.76	
Sandang	2.02	4.63	4.74	6.59	2.74	2.55	1.24	2.83	
Kesehatan	0.46	3.34	1.98	5.1	4.93	4.11	5.29	7.45	
Pendidikan, Rekreasi & OR	1.00	3.95	3.01	2.19	4.53	3.81	1.85	1.79	
Transport, Komunikasi & Keuangan	2.62	1.16	1.32	14.13	12.17	-2.01	-1.43	7.19	2.99

Sumber: BPS Kota Surakarta

Bila inflasi dilihat secara sektoral, maka inflasi dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan PDRB deflator, yaitu perbandingan PDRB harga berlaku dengan harga konstan. Berdasarkan pendekatan ini inflasi di Surakarta tahun 2018 mencapai 2,47% dan inflasi ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 4,65%. Sektor yang memiliki tingkat inflasi cukup besar pada tahun 2018 adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor jasa keuangan asuransi, serta sektor pendidikan.

Tabel 4.8. Perbandingan Inflasi Sektoral 2010 dan 2018

Lapangan Usaha	2010	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.46	2.92
Pertambangan dan Penggalian	3.42	4.32
Industri Pengolahan	6.34	3.05
Pengadaan Listrik dan Gas	4.23	3.12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1.62	0.33
Konstruksi	6.55	4.43
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.95	2.23
Transportasi dan Pergudangan	3.94	0.93
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.77	1.21
Informasi dan Komunikasi	1.70	-0.01
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.55	3.56
Real Estate	6.81	2.71
Jasa Perusahaan	5.54	2.78
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.08	1.86
Jasa Pendidikan	2.63	3.34
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.52	1.16
Jasa lainnya	4.39	0.65
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.65	2.47

Sumber: BPS Kota Surakarta

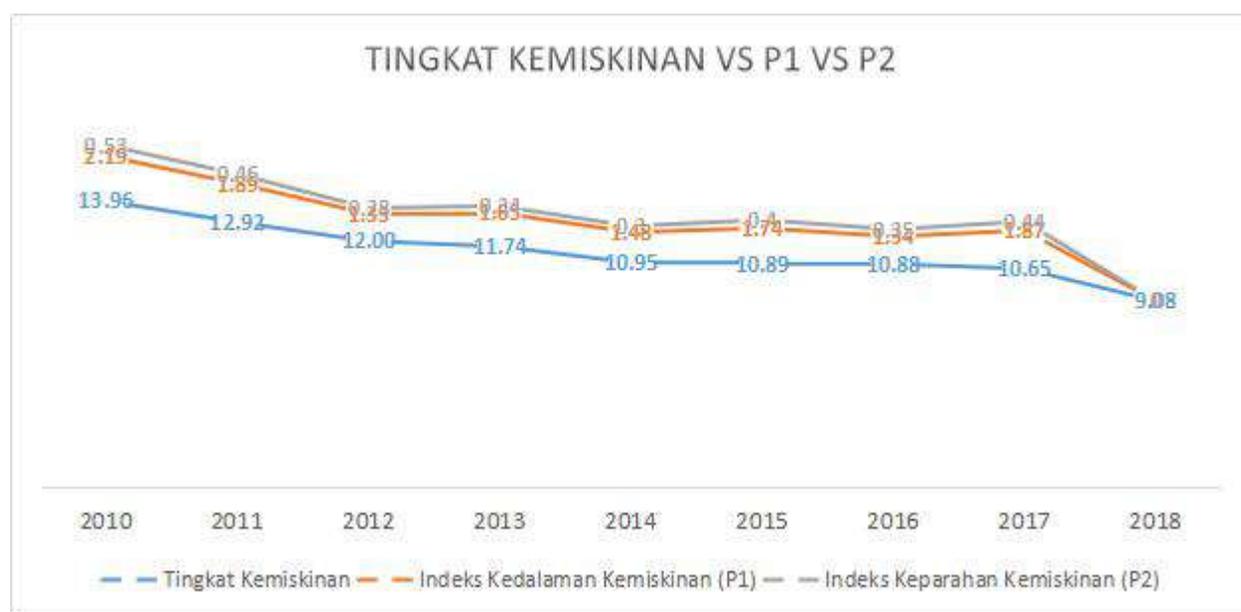
4.1.3. Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam kemiskinan, terdapat dua ukuran yang dipergunakan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan. Tingkat kemiskinan Surakarta selama 2010-2018 terlihat menunjukkan tren penurunan dari 13,96% di tahun 2010 menjadi 9,08% di tahun 2018 atau setiap tahun tingkat kemiskinan rata-rata turun sebesar -5,23%. Dalam hal tingkat kedalaman kemiskinan, pada tahun 2017 Kota Surakarta memiliki nilai 1,87 dengan rata-rata selama 2010-2017 sebesar 1,7 sedangkan dalam tingkat keparahan kemiskinan sebesar 0,44 dengan rata-rata selama 2010-2017 sebesar 0,39. Selama 2010-2017 setiap tahun tingkat kedalaman kemiskinan Kota Surakarta rata-rata turun sebesar -2,23% dan tingkat keparahan kemiskinan rata-rata turun sebesar -2,62% per tahun. Tren Antara tingkat kemiskinan, kedalaman kemiskinan (P1), dan keparahan kemiskinan (P2) terlihat memiliki pola fluktuasi yang sama.

Tabel 4.9. Indikator Kemiskinan Surakarta 2010-2018

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tingkat Kemiskinan	13.96	12.92	12.00	11.74	10.95	10.89	10.88	10.65	9.08
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2.19	1.89	1.33	1.63	1.48	1.74	1.34	1.87	
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.53	0.46	0.28	0.34	0.3	0.4	0.35	0.44	
Garis Kemiskinan	306,584	326,233	361,517	371,918	385,467	406,840	430,293	448,062	464,063

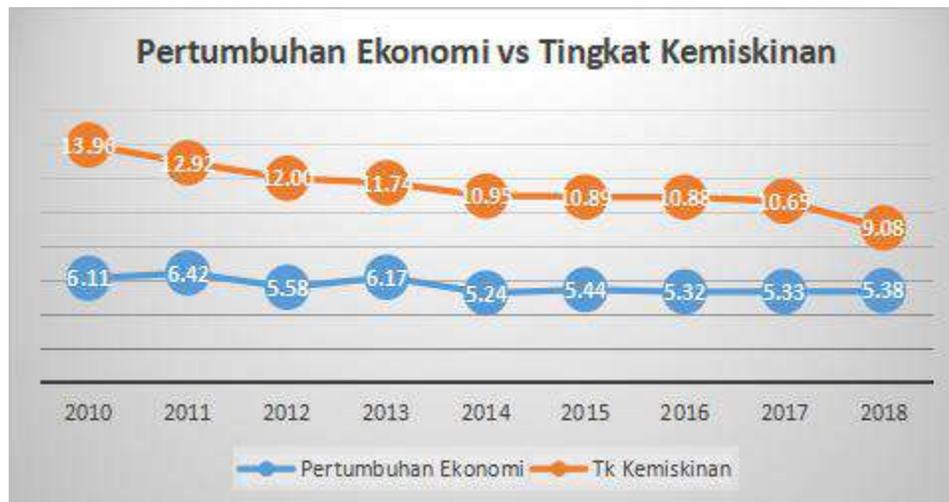
Sumber: BPS Kota Surakarta



Gambar 4.2. Tingkat Kemiskinan VS P1 VS P2

Sumber: BPS Kota Surakarta

Bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, selama 2010-2018 pola antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan memiliki karakteristik searah atau berbanding lurus. Nilai koefisien korelasi keduanya adalah $r=0,76$. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi di Surakarta justru membawa dampak pada peningkatan kemiskinan, padahal idealnya pertumbuhan ekonomi mampu mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Surakarta belum memiliki efek multiplier atau mekanisme transmisi yang jelas terhadap kemiskinan. Hal ini dapat mendorong meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.



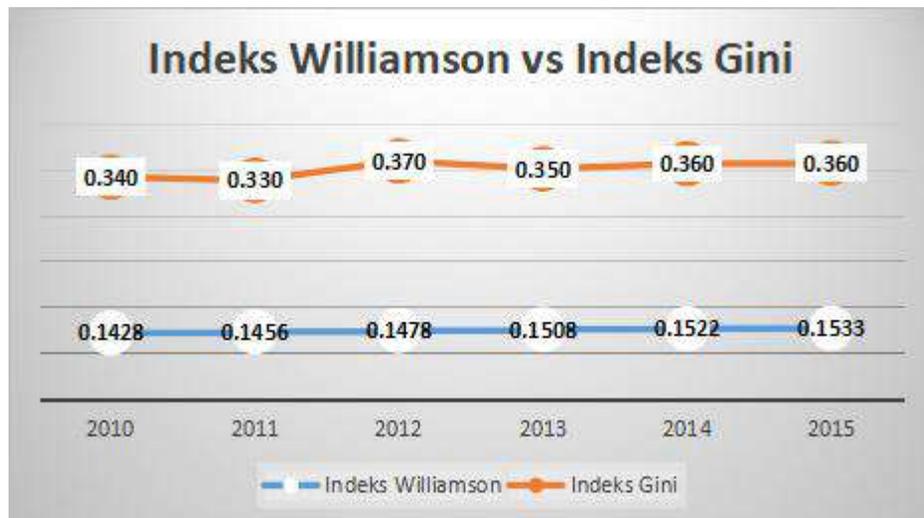
Gambar 4.3. Pertumbuhan Ekonomi VS Tingkat Kemiskinan

Sumber: BPS Kota Surakarta

Namun bila tingkat kemiskinan dikaitkan dengan PDRB, keduanya menunjukkan hubungan yang negative. Dengan demikian, agar pertumbuhan ekonomi membawa dampak pada pengurangan tingkat kemiskinan, maka PDRB harus menunjukkan peningkatan cukup tinggi (pertumbuhan ekonomi harus tinggi) dan di saat yang bersamaan jumlah penduduk miskin harus berkurang.

Untuk melihat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Surakarta, dapat dilihat berdasarkan Gini ratio atau indeks Gini, atau bias juga dilihat menggunakan Indeks Williamson. Berdasarkan nilai indeks Gini, nilai indeks Gini Surakarta tahun 2015 adalah 0,360 dan kondisi tersebut tidak berbeda dibandingkan tahun 2014. Angka indeks Gini yang di atas 0,30 merupakan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Sementara itu apabila diukur dengan indeks Williamson, tingkat ketimpangan di Surakarta tahun 2015 adalah 0,153 dan tahun 2014 adalah 0,152. Meskipun kedua indeks tersebut memiliki range yang berbeda, namun keduanya memiliki pola yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan di Surakarta menunjukkan tren yang meningkat. Dengan demikian peningkatan pertumbuhan ekonomi Surakarta belum memberikan dampak pada pengurangan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan.



Gambar 4.4. Indeks Williamson VS Indeks Gini

Sumber: BPS Kota Surakarta

Data indeks Gini di daerah hingga saat ini hanya terdapat sampai taun 2015 dan BPS hanya melakukan perhitungan indeks Gini pada level provinsi dan nasional. Hal ini membuat Surakarta mengalami kesulitan untuk meakukan evaluasi terhadap tingkat ketimpangan yang terjadi. Untuk itu, alternative yang dapat dilakukan adalah menggunakan indeks Williamson atau melakukan konversi dari indeks Williamson ke indeks Gini dengan menggunakan metode statistika rata-tata geometric.

Bila menggunakan rata-rata geometric untuk melakukan konversi dari indeks Williamson ke indeks Gini, diprakiakan nilai indeks Gini Surakarta pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar 0,3638 dan 0,3679. Dengan demikian ditaksir tingkat ketimpangan yang terjadi selama 2015-2017 menunjukkan tren yang meningkat.

Tabel 4.10. Proxy Indeks Gini Berdasarkan Indeks Williamson

JENIS INDEKS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
INDEKS WIILLIAMSON	0.1428	0.1456	0.1478	0.1508	0.1522	0.1533	0.1540	0.1557
INDEKS GINI	0.3400	0.3300	0.3700	0.3500	0.3600	0.3600	0.3638	0.3679

Sumber: Data Diolah

Bagaimanakah hubungan Antara kemiskinan dan ketimpangan? Bila kedua indikator tersebut digambarkan secara grafik, antara tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan (yang diukur menggunakan indeks Willaimson) menunjukkan

hubungan yang searah atau bebanding lurus. Nilai koefisien korelasi keduanya adalah $r=0,9775$ atau sangat erat. Hal ini berarti tingginya tingkat kemiskinan berdampak pada peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan.



Gambar 4.5. Kemiskinan VS Ketimpangan

Sumber: Data Diolah

4.1.4. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja Kota Surakarta pada tahun 2017 mencapai 410.000 orang terdiri dari 197.088 laki-laki dan 213.685 perempuan. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan dan bukan angkatan kerja, dan angkatan kerja sendiri terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut, jumlah angkatan kerja Kota Surakarta sebesar 271.527 orang. Dengan demikian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2017 mencapai 66,10%. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, angkatan kerja laki-laki berjumlah 147.504 dan perempuan sebanyak 124.023.

Jumlah pengangguran di Kota Surakarta per Agustus 2017 mencapai 12.133 terdiri dari 6.553 laki-laki dan 5.580 perempuan. Dengan demikian tingkat pengangguran di Kota Surakarta mencapai 4,47%. Tingkat pengangguran ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 4,57%

Tabel 4.11. Angkatan Kerja Kota Surakarta 2017

Kegiatan	Jenis Kelamin (Orang)		Total
	Laki laki	Perempuan	
ANGKATAN KERJA	147.504	124.023	271.527
Bekerja	140.951	118.443	259.394
Pengangguran	6.553	5.580	12.133
BUKAN ANGGKATAN KERJA	49.584	89.662	139.246
Sekolah	24.899	25.440	50.339
Mengurus Rumah Tangga	10.999	56.581	67.580
Lainnya	13.686	7.641	21.327
PENDUDUK USIA KERJA	197.088	213.685	410.773

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017

Angkatan kerja di Surakarta di Surakarta pada tahun 2017 mencapai 271.527. Sebagian besar angkatan kerja tersebut berpendidikan SMTA, yaitu 127.813 atau sebesar 47,07% dan yang terkecil berpendidikan diploma yaitu 17.512 atau 6,45%. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebanyak 12.133 orang merupakan pengangguran, sehingga tingkat pengangguran tahun 2017 mencapai 4,47%. Dari jumlah pengangguran yang ada, pengangguran terbesar adalah mereka yang berpendidikan SMTA, yaitu 6.797 atau 50,02% dari total jumlah penganggur. Jumlah lulusan sarjana yang menganggur di Kota Surakarta adalah 1.177 orang atau sebesar 9,70% dari total jumlah penganggur.

Tabel 4.12. Angkatan Kerja Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan Tertinggi tahun 2017

Kegiatan	Pendidikan (Orang)					Jumlah
	SD	SMTp	SMTA	DI/II/III / AKADEMI	UNIVERSITAS	
ANGKATAN KERJA	43505	45854	127813	17512	36843	271527
Bekerja	42326	44078	121016	16308	35666	259394
Pengangguran	1179	1776	6797	1204	1177	12133
BUKAN ANGKATAN KERJA	24909	43701	56084	4245	10307	139246
Sekolah	3586	27146	18447	863	297	50339
Mengurus Rumah Tangga	14839	13174	28759	2707	8101	67580
Lainnya	6484	3381	8878	675	1909	21327
PENDUDUK USIA KERJA	68414	89555	183897	21757	47150	410773

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dari sisi jumlah penduduk yang bekerja, sebanyak sebagian besar penduduk yaitu 106.513 orang atau 41,06% berprofesi sebagai tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar dan yang terkecil adalah tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan yang mencapai 1.341 atau 0,52%. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis Surakarta yang menyebabkan sulitnya sektor tersebut untuk berkembang. Dengan melihat banyaknya penduduk yang bekerja di bidang tenaga penjualan, tenaga usaha jasa, serta tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, maka Kota Surakarta dapat digambarkan sebagai kota perdagangan, jasa, dan industri yang didukung dengan bidang transportasi.

Tabel 4.13. Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Surakarta, 2017

Jenis Pekerjaan/Jabatan	Pendidikan (Orang)					Total
	SD	SMTp	SMTA	Diploma I/II/III/ Akademi	Universitas	
Tenaga profesional, teknisi dan yang sejenis	0	518	6019	3796	14609	24942
Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan	0	596	741	435	670	2442
Tenaga tata usaha dan yang sejenis	685	1357	8883	3312	5663	19900
Tenaga usaha penjualan	11137	6308	32187	3524	9556	62712
Tenaga usaha jasa	11338	5994	16172	1001	1756	36261
Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan	0	0	454	280	607	1341
Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar	18272	28629	52847	3960	2805	106513
Lainnya	894	676	3713	0	0	5283
Jumlah	42326	44078	121016	16308	35666	259394

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017

Bila dikaitkan dengan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan lapangan usaha atau sektor ekonomi, maka terlihat sebagian besar penduduk yaitu 100.971 atau 38,93% bekerja di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, selanjutnya sektor jasa kemasyarakatan yaitu sebesar 65.854 atau 25,39% dan urutan ketiga adalah sektor industri pengolahan yaitu 54.184 atau 20,89%.

Di sektor industri pengolahan, sebagian besar adalah pekerja yang berpendidikan SMTA. Demikian pula dengan sektor jasa kemasyarakatan dan sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebagian besar adalah berpendidikan SMTA. Mereka yang berpendidikan sarjana sebagian besar bekerja di sektor jasa kemasyarakatan dan disusul kemudian sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel. Sementara itu mereka yang berpendidikan SD sebagian besar bekerja di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel.

Tabel 4.14. Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Lapangan Usaha, 2017

Lapangan Usaha	Pendidikan (Orang)					Total
	SD	SMTP	SMTA	Diploma	Universitas	
				I/II/III/Akademi		
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	0	0	454	280	607	1341
Pertambangan dan penggalian	0	0	0	438	0	438
Industri Pengolahan	5378	11616	30636	2071	4483	54184
Listrik, gas dan air	0	0	1601	0	0	1601
Bangunan	1940	3151	1559	263	0	6913
Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	18482	14822	51601	5891	10175	100971
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	2269	2922	6187	1292	1224	13894
Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan	603	2185	3159	2026	6225	14198
Jasa kemasyarakatan	13654	9382	25819	4047	12952	65854
Jumlah	42326	44078	121016	16308	35666	259394

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017

Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah termasuk pemerintah daerah. Pengangguran akan mendorong timbulnya permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang ditempuh harus diarahkan pada upaya pengurangan tingkat pengangguran. Kenaikan jumlah pengangguran yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja akan mendorong peningkatan tingkat pengangguran, namun bila kenaikan jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah pengangguran, maka tingkat pengangguran akan turun.

Bagaimanakah hubungan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi? Studi yang pernah dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi negative dengan pengurangan tingkat pengangguran, sehingga pengurangan tingkat pengangguran dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Surakarta adalah positif $r=0,82$ namun korelasi antara tingkat pengangguran dengan PDRB adalah negative $r=-0,92$. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi PDRB diikuti dengan semakin berkurangnya tingkat pengangguran. Meski demikian, bila kenaikan PDRB

dari tahun ke tahun tersebut kecil (pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun kecil) maka tidak berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran.

Di sisi lain, hubungan Antara tingkat pengangguran dan tingkat ketimpangan adalah negative. Dengan menggunakan ukuran indeks Williamson, korelasi Antara tingkat pengangguran dan tingkat ketimpangan adalah $r = -0,91$. Dengan demikian, tingkat pengangguran yang semakin rendah diikuti oleh tingkat ketimpangan yang tinggi sehingga permasalahan pengangguran dan ketimpangan di Surakarta merupakan dua permasalahan yang berbeda. Kebijakan dan strategi yang dirumuskan haruslah bersifat integral dan komprehensif.



Gambar 4.6. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Pengangguran



Gambar 4.7. Hubungan Tingkat Pengangguran dengan Tingkat Ketimpangan

4.1.5. LQ dan Shift-Share

Analisis LQ merupakan analisis untuk melihat keunggulan suatu sektor atau subsektor secara relatif dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas, seperti Kota Surakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Pada dasarnya analisis ini untuk melihat posisi suatu sektor atau subsektor tertentu diantara sektor atau subsektor yang sama di seluruh wilayah. Implikasi lain adalah untuk melihat kemampuan suatu sektor atau subsektor untuk memenuhi kebutuhan internal wilayah.

Berdasarkan nilai LQ, sektor pertanian memiliki nilai LQ di bawah 1 atau tepatnya hanya 0.0314 di tahun 2010 dan tahun 2018 menjadi 0,0330. Kecilnya nilai LQ tersebut mengindikasikan bahwa usaha-usaha di bidang pertanian yang ada selama 2010-2018 tidak mampu memenuhi kebutuhan internal Kota Surakarta, sehingga harus didatangkan dari wilayah lain, misalnya Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Ngawi, dan sebagainya. Kondisi geografis menyebabkan kecilnya nilai LQ Surakarta untuk sektor ini.

Di sektor industri pengolahan nilai LQ secara keseluruhan hanya sekitar 0,22 dan nilai ini tidak berbeda jauh sepanjang 2010-2018. Kontribusi industri pengolahan dalam pembentukan PDRB Surakarta tergolong besar sehingga sangat mendorong perekonomian Surakarta, namun sebenarnya sektor ini di Surakarta bila dibandingkan dengan kondisi di provinsi Jawa Tengah masih sangat kurang. Terdapat dua subsektor yang memiliki nilai LQ di atas satu, yaitu subsektor industri pengolahan lainnya; jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, serta subsektor industri kertas dan barang dari kertas, percetakan. Tingginya nilai LQ menandakan bahwa di bidang kedua industri tersebut Kota Surakarta memiliki keunggulan di banding daerah lain di provinsi Jawa Tengah untuk jenis industri yang sama. Hal ini menjadikan Kota Surakarta mampu memenuhi kebutuhan dari kedua subsektor industri tersebut, serta mengekspor ke daerah lain. Subsektor industri dengan LQ sekitar 0,8 adalah industri karet, barang dari karet dan plastic serta subsektor industri tekstil dan pakaian jadi. Meski Kota Surakarta dikenal sebagai kota tekstil, namun output tekstil masih lebih rendah dibandingkan dengan output tekstil daerah lain di Jawa Tengah.

Sektor konstruksi serta perdagangan memiliki nilai LQ yang tinggi yaitu masing-masing 2,4844 dan 1,6002. Nilai LQ sektor penyediaan akomodasi pada tahun 2018 adalah 1,5315. Kota Surakarta memiliki fasilitas akomodasi yang sangat

memadai dengan tingkat hunian yang tinggi. Kondisi ini ditunjang dengan destinasi wisata mengingat Surakarta juga merupakan kota budaya.

Nilai LQ tertinggi adalah sektor informasi dan komunikasi yang pada tahun 2018 mencapai 2,9542. Dari perhitungan nilai LQ tersebut dapat disimpulkan bahwa perekonomian Surakarta memiliki keunggulan di hampir semua sektor, kecuali sektor pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, serta sektor transportasi dan pergudangan. Bila dilihat sepanjang 2010-2018, nilai LQ sektor ekonomi Surakarta hampir semuanya menunjukkan penurunan. Kondisi ini menggambarkan bahwa perekonomian Jawa Tengah (di luar Surakarta) berjalan sangat dinamis dan memberikan dampak kepada Surakarta.

**Tabel 4.15. Hasil Analisis Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Surakarta
Berdasarkan Lapangan Usaha, 2010-2018**

Uraian	LQ		SHIFT SHARE 2010-2018 (Juta Rp)			
	2010	2018	Regional Share (Nij)	Proportional Shift (Mij)	Differential Shift (Cij)	Shift Share (Dij)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.0314	0.0330	54,926.14	(31,365.56)	10,737.89	34,298.47
Pertambangan dan Penggalian	0.0013	0.0007	305.72	32.13	(414.53)	(76.69)
Industri Pengolahan	0.2207	0.2220	834,946.51	(20,960.04)	88,450.25	902,436.72
Pengadaan Listrik dan Gas	2.1467	2.0735	24,017.67	5,011.14	(384.57)	28,644.23
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	2.5811	2.3830	24,651.20	(14,368.38)	(2,870.22)	7,412.59
Konstruksi	2.7306	2.4844	3,092,780.07	102,770.16	(581,257.48)	2,614,292.75
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil d	1.6190	1.6002	2,609,568.48	(99,992.80)	137,760.87	2,647,336.56
Transportasi dan Pergudangan	0.8815	0.8428	288,946.98	120,308.81	(14,822.01)	394,433.78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.6158	1.5315	533,272.92	128,820.24	(40,408.84)	621,684.32
Informasi dan Komunikasi	3.3999	2.9542	1,244,900.68	1,645,019.95	(559,390.70)	2,330,529.93
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.3189	1.2396	399,620.70	(17,911.21)	(37,076.29)	344,633.20
Real Estate	2.4689	2.2692	463,135.54	143,047.99	(80,545.44)	525,638.09
Jasa Perusahaan	2.2205	1.9788	69,597.23	70,118.67	(22,649.93)	117,065.97
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	2.0379	2.0065	708,124.28	(387,094.97)	24,289.18	345,318.49
Jasa Pendidikan	1.3949	1.0836	401,011.48	556,890.88	(348,430.70)	609,471.65
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.2985	1.2043	93,509.27	89,526.34	(16,361.86)	166,673.75
PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010			10,956,846.72	2,318,480.66	(1,484,712.29)	11,790,615.09

Sumber: Data diolah, 2019.

Dari tinjauan shift-share, hanya sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki nilai negatif. Dari aspek regional share, semua sektor memiliki nilai regional share yang positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Jawa Tengah memberikan dampak positif bagi perekonomian Surakarta. Sebagai ilustrasi nilai regional shift industri pengolahan pada tahun 2018 sebesar Rp834milyar yang berarti kondisi perekonomian di Jawa Tengah mampu memberikan kontribusi terhadap output sektor industri pengolahan di Surakarta sebesar Rp834 milyar. Sementara itu proportional shift menggambarkan pengaruh struktur ekonomi Kota Surakarta terhadap suatu sektor atau subsektor. Industri

pengolahan misalnya memiliki nilai proportional shift pada tahun 2018 sebesar -Rp20,9 milyar. Hal ini merupakan indikasi bahwa struktur perekonomian di Kota Surakarta menyebabkan penurunan output sektor industri sebesar -Rp20,9 milyar. Dengan kata lain, perkembangan kondisi sektor industry saat ini lebih banyak disebabkan oleh dinamika perekonomian di luar Surakarta, bukan dari kondisi yang terjadi di dalam Surakarta itu sendiri.

Untuk differential shift, cukup banyak yang memiliki nilai negatif yang berarti daya kompetitif bidang-bidang tersebut masih belum tinggi atau masih kalah dibandingkan dengan sektor yang sejenis di wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian, meskipun kinerja sektor-sektor tersebut dari aspek rata-rata pertumbuhan dan proporsi tergolong baik atau tinggi, namun dibandingkan rata-rata daerah lain di Jawa Tengah masih kurang. Perkembangan yang terjadi masih dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Jawa Tengah serta struktur perekonomian Kota Surakarta, bukan karena daya kompetitifnya.

Secara keseluruhan, dinamika perekonomian Jawa Tengah memberikan dampak besar bagi perekonomian Kota Surakarta. Total nilai regional shift pada tahun 2018 menunjukkan bahwa dari total output perekonomian Kota Surakarta yang tercermin melalui PDRB, sebesar Rp10,9 trilyun akibat pengaruh perekonomian Jawa Tengah dan Rp2,3 trilyun akibat struktur perekonomian internal Kota Surakarta.

Perhitungan shift-share dinamis memberikan gambaran apakah suatu sektor atau subsektor terspesialisasi atau tidak, serta apakah suatu sektor atau subsektor memiliki daya saing atau tidak bila dibandingkan dengan sektor atau subsektor yang sama di Jawa Tengah. Nilai negatif efek spesialisasi menggambarkan bahwa sektor atau subsektor tersebut bukan merupakan sektor yang terspesialisasi di Surakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut belum menjadi sektor yang *“leading”* dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Demikian pula dengan nilai efek kompetitif yang negatif memberikan gambaran bahwa sektor tersebut memiliki daya saing yang lebih rendah dibandingkan subsektor sejenis di Jawa Tengah. Dengan demikian, ada kemungkinan suatu sektor merupakan sektor yang terspesialisasi di Surakarta, namun daya saingnya rendah (nilai positif kecil) atau bahkan tidak memiliki daya saing (nilai negatif). Sebaliknya, ada kemungkinan suatu sektor bukan merupakan sektor yang terspesialisasi di Surakarta, namun memiliki daya saing bila dibandingkan dengan sektor sejenis di wilayah Jawa Tengah. Sektor yang unggul

merupakan sektor yang memiliki efek spesialisasi dan efek kompetitif yang keduanya positif.

Tabel 4.16. Hasil Analisis Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Lapangan Usaha, 2010-2018

Uraian	SHIFT SHARE DINAMIS 2010-2018	
	Efek Spesialisasi	Efek Kompetitif
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-3,322,559	0.0998
Pertambangan dan Penggalian	-459,173	-0.6920
Industri Pengolahan	-5,775,907	0.0541
Pengadaan Listrik dan Gas	25,139	-0.0082
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	29,589	-0.0594
Konstruksi	3,840,867	-0.0959
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil d	1,955,105	0.0269
Transportasi dan Pergudangan	-76,098	-0.0262
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	398,233	-0.0387
Informasi dan Komunikasi	1,721,869	-0.2293
Jasa Keuangan dan Asuransi	189,335	-0.0473
Real Estate	539,920	-0.0888
Jasa Perusahaan	74,957	-0.1661
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	706,661	0.0175
Jasa Pendidikan	222,453	-0.4434
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42,121	-0.0893
PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010	-0.00966	-1.9721

4.2. ANALISIS PERBANDINGAN ANTAR WILAYAH DI JAWA TENGAH

4.2.1. Petumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Pertumbuhan ekonomi Surakarta sepanjang 2010-2018 terlihat fluktuatif dan hal yang juga terjadi untuk provinsi Jawa Tengah, nasional, serta rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah. Untuk tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Surakarta terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah, nasional, serta rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah. Dari sini secara umum kinerja pertumbuhan ekonomi Surakarta dapat disimpulkan sangat baik. Fluktuasi yang terjadi sepanjang periode tersebut juga terjadi di provinsi Jawa Tengah maupun nasional.

Bila dibandingkan dengan daerah lain yang berbentuk ‘kota’ di Jawa Tengah yang terdiri dari 6 kota, pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Surakarta bukanlah yang tertinggi, masih di bawah Kota Semarang dan Kota Tegal, serta mirip dengan

pertumbuhan Kota Pekalongan. Diantara daerah lain yang berstatus “kota”, Surakarta menempati posisi ke 3 dan selama 2011-2017 Surakarta belum pernah menduduki posisi teratas dalam pertumbuhan ekonomi. Struktur ekonomi dan kondisi geografis serta demografis merupakan factor penyebab perbedaan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.17. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Surakarta vs Provinsi vs Nasional

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata 2010-2018
1	Surakarta	6.11	6.42	5.58	6.17	5.24	5.44	5.32	5.33	5.41	5.60
2	Provinsi Jawa Tengah		5.30	5.34	5.14	5.42	5.40	5.26	5.27	5.32	5.31
3	Indonesia	6.10	6.50	6.23	5.56	5.01	4.88	5.03	5.07	5.17	5.40
4	Rata-rata Jawa Tengah		5.61	5.09	5.42	5.07	5.43	5.37	5.11	5.30	5.30

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4.18. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah

No	Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata 2011-2017
1	Kota Magelang	6.11	5.37	6.04	4.98	5.11	5.17	5.18	5.41
2	Kota Surakarta	6.42	5.58	6.25	5.28	5.44	5.32	5.33	5.64
3	Kota Salatiga	6.58	5.53	6.30	5.57	5.17	5.22	5.21	5.63
4	Kota Semarang	6.58	5.97	6.25	6.31	5.82	5.84	5.64	6.05
5	Kota Pekalongan	5.49	5.61	5.91	5.48	5.00	5.36	5.32	5.45
6	Kota Tegal	6.47	4.21	5.67	5.04	5.45	5.44	5.46	5.35

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi inflasi, selama 2010-2018 inflasi Surakarta juga terlihat berfluktuasi. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan mencapai titik terendah di tahun 2011 yaitu sebesar 1,93%. Inflasi tahun 2018 sebesar 2,45% dan inflasi ini mengalami penurunan cukup besar dibandingkan tahun 2017. Sepanjang 2010-2018 laju inflasi Surakarta lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah dan nasional, kecuali di tahun 2013 inflasi Surakarta lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah, namun masih lebih rendah dibandingkan nasional. Fenomena fluktuasi inflasi yang terjadi di Surakarta ini memiliki pola yang sama dengan pola fluktuasi di Jawa Tengah dan nasional.

Bila dibandingkan antar daerah yang bestatus “kota” yang terdiri dari 6 kota, kinerja inflasi Surakarta juga masih yang terkecil pada tahun 2016 dan 2017. Semua daerah terlihat menunjukkan kenaikan laju inflasi dari 2016 ke 2017, namun Surakarta mampu mengendalikan laju inflasi sehingga kenaikan laju inflasi yang terjadi tidak sebesar kota lain. Kota Tegal memiliki inflasi yang tertinggi diantara kota lain di tahun 2017 sedangkan di tahun 2016 Kota Pekalongan yang memiliki inflasi tertinggi. Bila dihitung rata-rata laju inflasi selama 2010-2018, Kota Semarang memiliki rata-rata inflasi yang lebih rendah dibandingkan Surakarta. Hal ini disebabkan pada tahun 2012 inflasi Kota Semarang (dan juga Kota Tegal) menurun cukup drastis pada periode tersebut sementara Surakarta justru mengalami kenaikan.

Tabel 4.19. Perbandingan Inflasi Surakarta vs Provinsi vs Nasional

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Surakarta	6.65	1.93	2.87	8.32	8.01	2.56	2.15	3.10	2.45
2	Provinsi Jawa Tengah	6.88	2.68	4.24	7.99	8.22	2.73	2.36	3.71	2.82
3	Indonesia	6.96	3.79	4.30	8.38	8.36	3.35	3.02	3.61	3.13
4	Rata-rata Jawa Tengah	6.18	2.78	3.70	7.17	7.07	2.76	2.36	3.25	n.a.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4.20. Perbandingan Inflasi Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah

No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata 2010-2017
1	Kota Magelang	6.8	4.15	6.05	7.79	7.92	2.70	2.25	3.90	4.73
2	Kota Surakarta	6.65	1.93	2.87	8.32	8.01	2.56	2.15	3.10	3.78
3	Kota Salatiga	6.65	2.84	4.12	7.67	7.84	2.61	2.19	3.50	4.18
4	Kota Semarang	7.11	2.87	0.41	8.19	8.53	2.56	2.32	3.64	3.26
5	Kota Pekalongan	6.77	2.45	3.55	7.4	7.82	3.46	2.94	3.61	4.34
6	Kota Tegal	6.73	2.58	0.40	5.80	7.40	3.95	2.71	4.03	3.26

Sumber: Badan Pusat Statistik

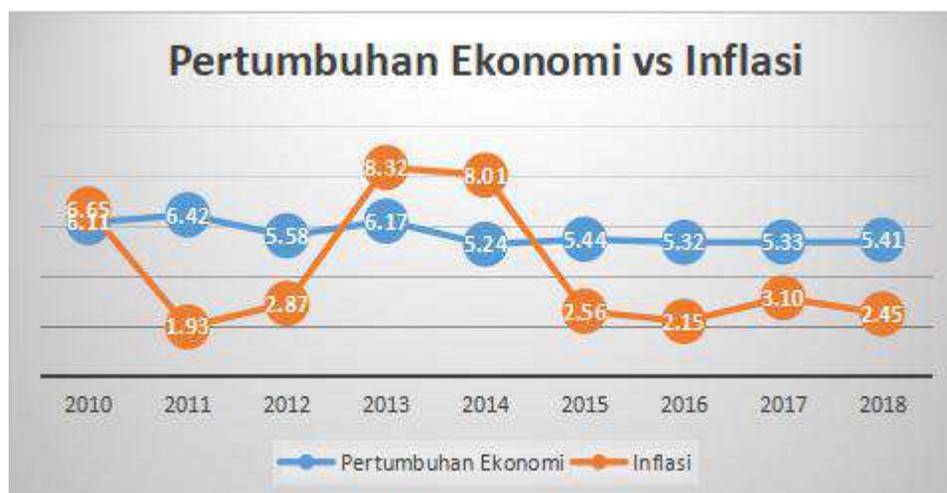
Inflasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat. Beberapa studi yang pernah dilakukan menunjukkan adanya hubungan kausalitas diantara

keduanya, artinya inflasi dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada laju inflasi. Hal ini perlu dicermati faktor penyebabnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun diikuti oleh laju inflasi yang tinggi mengindikasikan terjadinya *overheating economy*. Kondisi ideal yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan inflasi yang rendah.

Di Surakarta, selama 2010-2018 antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi terlihat memiliki hubungan positif atau berbanding lurus. Demikian juga dengan kota lain di Jawa Tengah. Hal ini merupakan indikasi awal bahwa antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi di Surakarta tidak memiliki kausalitas yang kuat. Inflasi di Surakarta antara lain disebabkan oleh "*imported inflation*", yaitu faktor-faktor eksternal yang terjadi di luar Surakarta. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak mendorong terjadinya inflasi.

Kota	Korelasi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Kota Magelang	0.23
Kota Surakarta	0.10
Kota Salatiga	0.33
Kota Semarang	0.42
Kota Pekalongan	0.52
Kota Tegal	0.21

Gambar 4.8. Pertumbuhan Ekonomi VS Inflasi



4.2.2. Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat kemiskinan di Surakarta selama 2010-2018 terlihat memiliki tren yang terus menurun. Sepanjang periode tersebut tingkat kemiskinan di Surakarta

selalu lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah maupun rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah. Bila dibandingkan dengan tingkat nasional dan provinsi Jawa Tengah, tingkat kemiskinan di Surakarta terlihat lebih kecil di tahun 2018. Sepanjang 2010-2018 rata-rata setiap tahun tingkat kemiskinan Surakarta turun sebesar -5.23% sementara untuk provinsi dan nasional rata-rata turun sebesar 4%.

Meskipun tingkat kemiskinan Surakarta di tahun 2018 relatif kecil namun bila dibandingkan dengan daerah lain yang berstatus “kota”, tingkat kemiskinan Surakarta adalah yang tertinggi. Tingginya tingkat kemiskinan Surakarta terjadi sepanjang 2010-2018. Tingkat kemiskinan Surakarta jauh lebih tinggi dibandingkan Kota Salatiga dan Kota Semarang yang berkisar 4%.

Tabel 4.21. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Surakarta vs Provinsi vs Nasional

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata 2010-2018	Rata-rata Pertumbuhan
1	Surakarta	13.96	12.92	12.00	11.74	10.95	10.89	10.88	10.65	9.08	11.38	-5.23
2	Provinsi Jawa Tengah	16.11	16.21	14.98	14.44	13.58	13.58	13.27	13.01	11.32	13.98	-4.32
3	Indonesia	13.90	12.36	11.66	14.47	10.96	11.13	10.70	10.12	9.66	11.56	-4.45
4	Rata-rata Jawa Tengah	15.46	15.58	14.42	13.86	13.04	13.03	12.73	12.49	10.90	13.43	-4.28

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4.22. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah

No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata 2010-2018	Rata-rata Pertumbuhan 2010-2018
1	Kota Magelang	10.51	11.06	10.31	9.8	9.14	9.05	8.79	8.75	7.87	9.427	-3.55
2	Kota Surakarta	13.96	12.9	12	11.74	10.95	10.89	10.88	10.65	9.08	11.373	-5.23
3	Kota Salatiga	8.28	7.8	7.11	6.4	5.93	5.8	5.24	5.07	4.84	6.172	-6.49
4	Kota Semarang	5.12	5.68	5.13	5.25	5.04	4.97	4.85	4.62	4.14	4.961	-2.62
5	Kota Pekalongan	9.36	10.04	9.47	8.26	8.02	8.09	7.92	7.47	6.75	8.317	-4.00
6	Kota Tegal	10.62	10.81	10.04	8.84	8.54	8.26	8.2	8.11	7.81	8.963	-3.77

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam kemiskinan, terdapat dua ukuran yang dipergunakan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan. Dalam hal tingkat kedalaman kemiskinan, pada tahun 2018 Kota Surakarta memiliki nilai 1,47 (peringkat 15 di seluruh Jawa Tengah) dengan rata-rata selama 2010-2018 sebesar 1,64 sedangkan dalam tingkat keparahan kemiskinan sebesar 0,34 (peringkat 16 di seluruh Jawa Tengah) dengan rata-rata selama 2010-2018 sebesar 0,38. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tingkat provinsi Jawa Tengah. Selama 2010-2018 setiap tahun tingkat kedalaman kemiskinan Kota Surakarta rata-rata turun sebesar -4,86% dan tingkat keparahan kemiskinan rata-rata turun sebesar -5,05% per tahun.

Bila dibandingkan dengan kota lain di Jawa Tengah, kondisi Surakarta untuk P1 dan P2 masih yang tertinggi pada tahun 2018. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius mengingat P1 menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan. Dengan nilai P1 sebesar itu, berarti pengeluaran penduduk miskin di Surakarta adalah yang terjauh dari garis emiskinan dibandingkan kota lain. Untuk P2, pengeluaran diantara penduduk miskin di Surakarta adalah yang paling timpang dibandingkan dengan kota lain di Jawa Tengah.

Tabel 4.23. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata	Rata-rata Pertumbuhan
Kota Magelang	1.61	1.61	1.48	1.45	0.94	1.39	1.2	1.3	1.07	1.32	-4.98
Kota Surakarta	2.19	1.89	1.33	1.63	1.48	1.74	1.34	1.87	1.47	1.64	-4.86
Kota Salatiga	0.94	1.3	0.77	0.94	0.87	1.07	0.6	0.85	0.69	0.87	-3.79
Kota Semarang	0.89	0.71	0.8	0.65	0.47	0.5	0.76	0.54	0.58	0.64	-5.21
Kota Pekalongan	1.11	1.37	1.09	0.93	1.14	0.83	0.8	0.92	1.01	1.01	-1.17
Kota Tegal	1.72	1.89	0.95	0.94	1.38	1.34	1.04	1.42	1.23	1.29	-4.1
Provinsi Jawa Tengah	2.62	2.58	2.39	2.37	2.09	2.44	2.37	2.21	1.85	2.31	-4.26
Rata-rata seluruh Jateng	2.26	2.24	1.89	1.84	1.7	1.98	1.88	1.77	1.57	1.89	-4.46

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4.24. Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata	Rata-rata Pertumbuhan
Kota Magelang	0.39	0.36	0.33	0.37	0.2	0.31	0.23	0.32	0.21	0.29	-7.45
Kota Surakarta	0.53	0.46	0.28	0.34	0.3	0.4	0.35	0.44	0.35	0.38	-5.05
Kota Salatiga	0.16	0.33	0.13	0.18	0.21	0.26	0.11	0.21	0.13	0.18	-2.56
Kota Semarang	0.25	0.18	0.19	0.13	0.08	0.09	0.18	0.12	0.12	0.14	-8.77
Kota Pekalongan	0.19	0.32	0.19	0.16	0.26	0.15	0.13	0.2	0.22	0.20	1.85
Kota Tegal	0.44	0.51	0.15	0.18	0.38	0.35	0.21	0.38	0.3	0.30	-4.67
Provinsi Jawa Tengah	0.68	0.66	0.57	0.59	0.51	0.65	0.63	0.57	0.45	0.59	-5.03
Rata-rata seluruh Jateng	0.55	0.53	0.41	0.4	0.38	0.49	0.46	0.42	0.36	0.44	-5.02

Sumber: Badan Pusat Statistik

Besar kecilnya tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk, sementara penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang pengeluaran perkapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Tahun 2018 garis kemiskinan Surakarta sebesar Rp464.063. Nilai ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan garis kemiskinan provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Bila dilihat dari rata-rata pertumbuhan per tahun, rata-rata setiap tahun garis kemiskinan Surakarta naik sebesar 5,32% dan angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah maupun nasional yang masing-masing tumbuh 6,17% dan 9,13% per tahun. Dibandingkan dengan 6 kota lain di Jawa Tengah, garis kemiskinan Surakarta pada tahun 2018 masih di bawah Kota Magelang. Garis kemiskinan Surakarta juga memiliki rata-rata kenaikan per tahun yang terendah diantara 6 kota di Jawa Tengah.

Tabel 4.25. Perbandingan Garis Kemiskinan Surakarta vs Provinsi vs Nasional

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata 2010-2018	Rata-rata Pertumbuhan
1	Surakarta	306,584	326,233	361,517	371,918	385,467	406,840	430,293	448,062	464,063	388,997	5.32
2	Provinsi Jawa Tengah	217,327	217,440	233,769	261,881	281,570	297,851	317,348	333,224	350,875	279,032	6.17
3	Indonesia	211,726	233,740	259,520	275,779	326,853	356,378	372,114	400,995	425,770	318,097	9.13
4	Rata-rata Jawa Tengah	221,193	240,319	259,367	280,661	294,014	305,552	327,561	340,931	357,719	291,924	6.19

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4.26. Perbandingan Garis Kemiskinan Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah

No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata 2010-2018	Rata-rata Pertumbuhan 2010-2018
1	Kota Magelang	258,921	280,877	313,250	350,554	376,143	405,228	425,191	450,908	476,582	363,654	7.92
2	Kota Surakarta	306,584	326,233	361,517	403,121	417,807	406,840	430,293	448,062	464,063	392,617	5.32
3	Kota Salatiga	241,223	254,726	277,039	302,884	320,204	337,511	345,146	359,944	380,856	309,902	5.87
4	Kota Semarang	246,195	272,996	297,848	328,271	348,824	368,477	382,160	402,297	427,511	336,634	7.14
5	Kota Pekalongan	251,952	270,663	294,586	322,313	338,398	352,717	375,600	390,555	415,172	330,516	6.44
6	Kota Tegal	270,788	280,349	305,818	333,553	353,301	371,528	395,631	418,845	455,488	348,954	6.72

Sumber: Badan Pusat Statistik

Di dalam permasalahan ketimpangan yang diukur dengan indeks Gini, nilai indeks Gini Kota Surakarta tersebut masuk dalam peringkat 32 dari 35 daerah di Jawa Tengah. Dari sisi rata-rata pertumbuhan tiap tahun, nilai indeks Gini Kota Surakarta memiliki rata-rata pertumbuhan per tahun selama 2010-2015 sebesar 1,69%. Meski angka rata-rata pertumbuhan ini tergolong kecil secara relatif (dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah), namun secara absolute termasuk tinggi.

Data indeks Gini untuk tingkat kabupaten/kota secara resmi hanya tersedia hingga tahun 2015. Bila indeks Gini Surakarta diproyeksi dari perhitungan indeks Williamson, maka diperkirakan nilai indeks Gini 2016 dan 2017 Surakarta masing-masing 0,363 dan 0,367. Nilai indeks Gini Surakarta ini lebih tinggi dari rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah, indeks Gini provinsi, serta indeks Gini nasional. Bila dibandingkan antar 6 kota di Jawa Tengah, nilai indeks Gini Surakarta tergolong yang tertinggi. Meski di tahun 2015 nilai indeks Gini Surakarta sama dengan Kota

Magelang, namun rata-rata indeks Gini Surakarta selama 2010-2015 lebih tinggi dibandingkan Kota Magelang.

Tabel 4.27. Perbandingan Indeks Gini Surakarta vs Provinsi vs Nasional

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Surakarta	0.340	0.330	0.370	0.350	0.360	0.360	0.363*	0.367*	N.A.
2	Provinsi Jawa Tengah	0.297	0.335	0.323	0.320	0.334	0.326	0.344	0.323	0.327
3	Indonesia	0.315	0.340	0.330	0.320	0.319	0.334	0.327	0.320	0.324
4	Rata-rata Jawa Tengah	0.267	0.327	0.339	0.334	0.332	0.332	N.A.	N.A.	N.A.

**proxy dengan menggunakan Indeks Williamson*

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4.28. Perbandingan Indeks Gini Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah

No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata 2010-2015	Rata-rata Pertumbuhan 2010-2015
1	Kota Magelang	0.31	0.34	0.37	0.33	0.36	0.36	0.344	3.04
2	Kota Surakarta	0.34	0.33	0.37	0.35	0.36	0.36	0.351	1.15
3	Kota Salatiga	0.35	0.34	0.35	0.37	0.35	0.35	0.352	0.00
4	Kota Semarang	0.32	0.35	0.35	0.35	0.31	0.31	0.331	-0.63
5	Kota Pekalongan	0.28	0.31	0.33	0.32	0.34	0.34	0.319	3.96
6	Kota Tegal	0.24	0.32	0.33	0.32	0.31	0.31	0.303	5.25

Sumber: Badan Pusat Statistik

4.2.3. Tingkat Pengangguran

Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah termasuk pemerintah daerah. Pengangguran akan mendorong timbulnya permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang ditempuh harus diarahkan pada upaya pengurangan tingkat pengangguran. Kenaikan jumlah pengangguran yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja akan mendorong peningkatan tingkat pengangguran, namun bila kenaikan jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah pengangguran, maka tingkat pengangguran akan turun.

Tingkat pengangguran di Surakarta pada tahun 2017 mencapai 4,47% dan pada tahun 2018 turun menjadi 4,39%. Jumlah ini tergolong kecil bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran di provinsi Jawa Tengah dan nasional. Bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, posisi Surakarta pada tahun 2017

berada di tengah-tengah yaitu peringkat 18 dari 35. Data tingkat pengangguran tahun 2018 belum tersedia secara lengkap untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Diantara 6 kota lain di Jawa Tengah, tingkat pengangguran Surakarta tahun juga 2017 tergolong kecil meskipun bukan yang terkecil. Tingkat pengangguran Surakarta masih di bawah Kota Salatiga. Meski demikian, rata-rata pengurangan tingkat pengangguran Kota Surakarta selama 2010-2017 tergolong cukup tinggi yaitu -9,12% per tahun.

Tabel 4.29. Perbandingan Tingkat Pengangguran Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
1	Surakarta	8.73	7.70	6.29	7.22	6.16	4.53	n.a.	4.47	4.39	-8.23
2	Provinsi Jawa Tengah	6.21	7.07	5.61	6.01	5.68	4.99	4.63	4.57	4.51	-3.92
3	Indonesia	7.14	7.48	6.13	6.17	5.94	6.18	5.61	5.50	5.34	-3.57
4	Rata-rata Jawa Tengah	6.48	7.12	5.75	6.01	5.63	4.97	n.a.	4.54	n.a.	-4.97

Tabel 4.30. Perbandingan Tingkat Pengangguran Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah

No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	Rata-rata 2010-2017	Rata-rata Pertumbuhan 2010-2017
1	Kota Magelang	13.28	11.51	8.99	6.75	7.38	6.43	6.68	8.40	-9.35
2	Kota Surakarta	8.73	7.7	6.29	7.22	6.16	4.53	4.47	6.27	-9.12
3	Kota Salatiga	10.22	9.02	6.84	6.21	4.46	6.43	3.96	6.41	-12.67
4	Kota Semarang	8.98	7.65	6.01	6.02	7.76	5.77	6.61	6.89	-4.28
5	Kota Pekalongan	7	8.06	7.67	5.28	5.42	4.1	5.05	5.93	-4.56
6	Kota Tegal	14.22	9.77	8.75	9.32	9.2	8.06	8.19	9.48	-7.58

4.2.4. Indikator Sosial dan Kesejahteraan

Salah satu indikator sosial dan kesejahteraan adalah indikator yang merupakan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), serta pengeluaran perkapita. Berdasarkan indikator tersebut, Surakarta memiliki nilai tertinggi untuk keempat komponen IPM bila dibandingkan dengan rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah, provinsi Jawa Tengah, maupun nasional. Tren Surakarta untuk keempat indikator tersebut selalu naik sepanjang 2010-2018. Dari sisi rata-rata

pertumbuhan indikator tiap tahun selama 2010-2018, Surakarta memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi untuk AHH, namun memiliki rata-rata pertumbuhan terendah untuk HLS dan RLS.

Tabel 4.31. Angka Harapan Hidup (AHH)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
1	Surakarta	72.16	72.25	72.35	76.97	76.99	77.00	77.03	77.06	77.11	0.83
2	Provinsi Jawa Tengah	72.73	72.91	73.09	73.28	73.88	73.96	74.02	74.08	74.18	0.25
3	Indonesia	69.81	70.01	70.20	70.40	70.59	70.78	70.90	71.06	71.2	0.25
4	Rata-rata Jawa Tengah	74.17	74.24	74.30	74.37	74.41	74.50	74.56	74.63	74.69	0.09

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4.32. Harapan Lama Sekolah

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
1	Surakarta	13.17	13.34	13.5	13.64	13.92	14.14	14.5	14.51	14.52	1.23
2	Provinsi Jawa Tengah	11.09	11.18	11.39	11.89	12.17	12.38	12.45	12.57	12.63	1.64
3	Indonesia	11.29	11.44	11.68	12.10	12.39	12.55	12.72	12.85	12.91	1.69
4	Rata-rata Jawa Tengah	11.21	11.41	11.63	11.90	12.19	12.46	12.59	12.72	12.74	1.62

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4.33. Rata-rata Lama Sekolah

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
1	Surakarta	9.99	10.05	10.11	10.25	10.33	10.36	10.37	10.38	10.53	0.66
2	Provinsi Jawa Tengah	6.71	6.74	6.77	6.80	6.93	7.03	7.15	7.27	7.35	1.15
3	Indonesia	7.46	7.52	7.59	7.61	7.73	7.84	7.95	8.10	8.17	1.14
4	Rata-rata Jawa Tengah	6.74	6.85	6.96	7.11	7.24	7.37	7.45	7.58	7.57	1.46

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4.34. Pengeluaran per kapita (Rp ribuan)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
1	Surakarta	12,123	12,464	12,680	12,820	12,907	12,604	13,900	13,986	14,528	2.29
2	Provinsi Jawa Tengah	8,992	9,296	9,497	9,618	9,640	9,930	10,153	10,377	10,777	2.29
3	Indonesia	9,437	9,647	9,815	9,858	9,903	10,150	10,420	10,664	11,059	2.00
4	Rata-rata Jawa Tengah	9,012	9,296	9,497	9,618	9,655	9,938	10,181	10,414	10,837	2.33

Sumber: Badan Pusat Statistik

Bila diperbandingkan antar 6 kota di Jawa Tengah, untuk AHH tahun 2018 tertinggi adalah Kota Semarang sedangkan Surakarta dan Salatiga memiliki nilai yang sama yaitu 77,11 namun rata-rata kenaikan per tahun Salatiga sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Surakarta. Untuk indikator HLS, posisi Surakarta pada tahun 2018 juga di bawah Kota Semarang dan Salatiga sedangkan dalam hal pengeluaran perkapita, Surakarta juga di bawah Salatiga dan Kota Semarang. Untuk RLS Surakarta memiliki posisi teratas diantara 6 kota tersebut. Bila dilihat dari sisi rata-rata kenaikan per tahun (pertumbuhan) masing-masing indikator selama 2010-2018, kondisi Surakarta termasuk yang bawah seperti rata-rata pertumbuhan AHH hanya 0,04%, HLS sebesar 1,23%, RLS sebesar 0,66%, serta pengeluaran perkapita sebesar 2,29% per tahun. Posisi tersebut adalah urutan kedua dari yang terendah.

Tabel 4.35. Angka Harapan Hidup

	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata 2010- 2018	Rata-rata Pertumbuhan 2010- 2018
1	Kota Magelang	76.39	76.44	76.49	76.54	76.57	76.58	76.62	76.66	76.72	76.56	0.05
2	Kota Surakarta	76.85	76.89	76.93	76.97	76.99	77	77.03	77.06	77.11	76.98	0.04
3	Kota Salatiga	76.48	76.5	76.52	76.53	76.53	76.83	76.87	76.98	77.11	76.71	0.10
4	Kota Semarang	77.17	77.17	77.18	77.18	77.18	77.2	77.21	77.21	77.23	77.19	0.01
5	Kota Pekalongan	73.91	73.96	74.01	74.06	74.09	74.11	74.15	74.19	74.25	74.08	0.06
6	Kota Tegal	73.83	73.91	73.98	74.06	74.1	74.12	74.18	74.23	74.3	74.08	0.08

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4.36. Harapan Lama Sekolah

No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata 2010-2018	Rata-rata Pertumbuhan 2010-2018
1	Kota Magelang	12.22	12.33	12.49	12.65	12.98	13.1	13.55	13.79	13.8	12.98	1.53
2	Kota Surakarta	13.17	13.34	13.5	13.64	13.92	14.14	14.5	14.51	14.52	13.91	1.23
3	Kota Salatiga	14.56	14.59	14.6	14.61	14.95	14.97	14.98	14.99	15	14.80	0.37
4	Kota Semarang	13.12	13.26	13.37	13.66	13.97	14.33	14.7	15.2	15.5	14.10	2.11
5	Kota Pekalongan	10.96	11.05	11.13	11.56	11.93	12.59	12.77	12.78	12.79	11.93	1.95
6	Kota Tegal	11.15	11.24	11.33	11.61	11.96	12.46	12.88	12.89	12.9	12.03	1.84

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4.37. Rata-rata Lama Sekolah

No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata 2010-2018	Rata-rata Pertumbuhan 2010-2018
1	Kota Magelang	10.08	10.14	10.2	10.22	10.27	10.28	10.29	10.3	10.31	10.23	0.28
2	Kota Surakarta	9.99	10.05	10.11	10.25	10.33	10.36	10.37	10.38	10.53	10.26	0.66
3	Kota Salatiga	8.86	8.97	9.09	9.2	9.37	9.81	9.82	10.15	10.4	9.51	2.02
4	Kota Semarang	9.61	9.8	9.92	10.06	10.19	10.2	10.49	10.5	10.51	10.14	1.13
5	Kota Pekalongan	7.6	7.72	7.8	7.96	8.12	8.28	8.29	8.56	8.57	8.09	1.51
6	Kota Tegal	7.46	7.66	7.85	8.05	8.26	8.27	8.28	8.29	8.3	8.04	1.34

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4.38. Pengeluaran Perkapita (Rp ribu)

No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata 2010-2018	Rata-rata Pertumbuhan 2010-2018
1	Kota Magelang	9,681	9,922	10,169	10,258	10,344	10,793	11,090	11,525	11,994	10,618	2.71
2	Kota Surakarta	12,123	12,464	12,680	12,820	12,907	13,604	13,900	13,986	14,528	13,202	2.29
3	Kota Salatiga	13,411	13,727	13,966	14,125	14,205	14,600	14,811	14,921	15,464	14,346	1.80
4	Kota Semarang	11,987	12,271	12,488	12,714	12,802	13,589	13,909	14,334	14,895	13,188	2.75
5	Kota Pekalongan	10,224	10,560	10,756	10,922	11,006	11,253	11,721	11,800	12,312	11,155	2.35
6	Kota Tegal	10,644	10,965	11,251	11,416	11,519	11,748	11,849	12,283	12,830	11,595	2.36

Sumber: Badan Pusat Statistik

Apabila keempat indikator di atas digabung sebagai indeks komposit, maka akan dapat ditentukan IPM. Surakarta pada tahun 2018 memiliki IPM 81,46 dan angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah maupun nasional, serta rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah. Meski demikian, rata-rata pertumbuhan IPM per tahun selama 2010-2018 Surakarta hanya 0,57% dan angka ini adalah yang terendah dibandingkan dengan provinsi dan nasional.

Dari perbandingan dengan 6 kota di Jawa Tengah, IPM Surakarta bukanlah yang tertinggi diantara 6 kota tersebut, namun peringkat ke 3 setelah Kota Semarang dan Salatiga. Untuk rata-rata pertumbuhan per tahun IPM, Surakarta juga termasuk rendah dibandingkan dengan 5 kota lain di Jawa Tengah.

Tabel 4.39. Perbandingan IPM Surakarta vs Provinsi Jawa Tengah vs Nasional

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata 2010-2018	Rata-rata Pertumbuhan 2010-2018
1	Surakarta	77.86	78.18	78.60	78.89	79.34	80.14	80.76	80.85	81.46	79.56	0.57
2	Provinsi Jawa Tengah	66.08	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49	69.98	70.52	71.12	68.63	0.92
3	Indonesia	66.53	67.09	67.70	68.31	68.90	69.55	70.18	70.81	71.39	68.92	0.89
4	Rata-rata Jawa Tengah	66.66	67.40	68.05	68.73	69.27	70.08	70.61	71.19	71.65	69.27	0.91

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4.40. Perbandingan IPM Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah

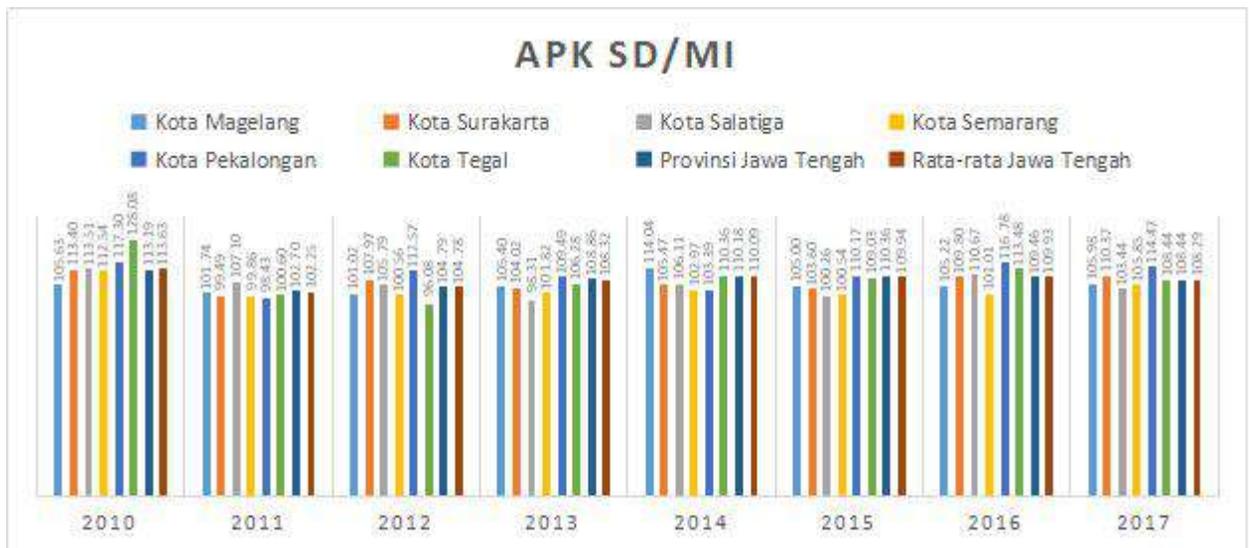
No	Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata 2010-2018	Rata-rata Pertumbuhan 2010-2018
1	Kota Magelang	73.99	74.47	75	75.29	75.79	76.39	77.16	77.84	78.31	76.01	0.71
2	Kota Surakarta	77.45	78	78.44	78.89	79.34	80.14	80.76	80.85	81.46	79.47	0.63
3	Kota Salatiga	78.35	78.76	79.1	79.37	79.98	80.96	81.14	81.68	82.41	80.18	0.63
4	Kota Semarang	76.96	77.58	78.04	78.68	79.24	80.23	81.19	82.01	82.72	79.60	0.91
5	Kota Pekalongan	68.95	69.54	69.95	70.82	71.53	72.69	73.32	73.77	74.24	71.62	0.93
6	Kota Tegal	69.33	70.03	70.68	71.44	72.2	72.96	73.55	73.95	74.44	72.04	0.89

Sumber: Badan Pusat Statistik

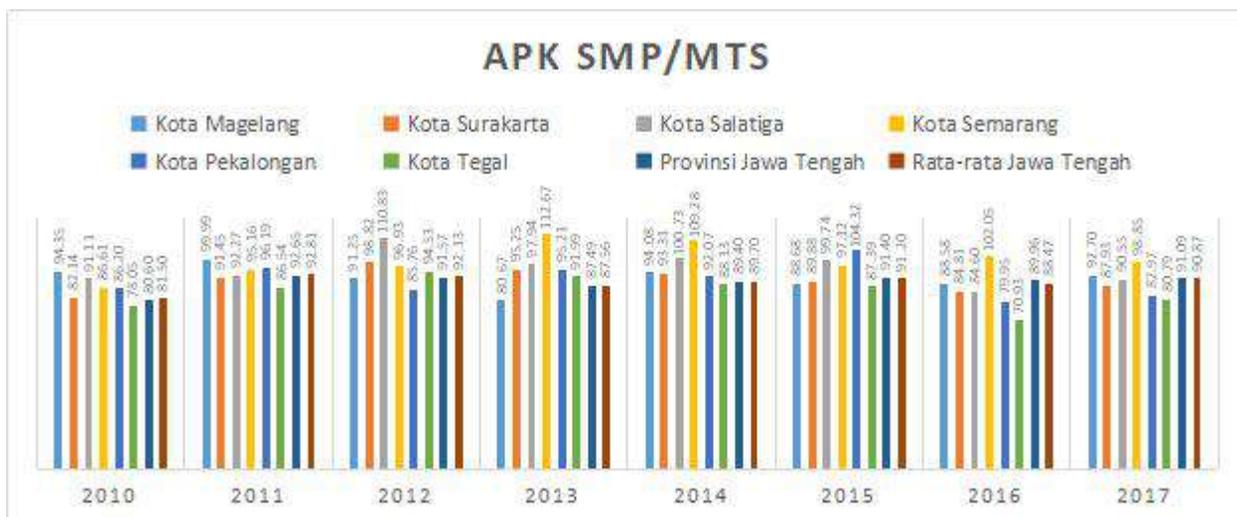
Dari sisi pendidikan, salah satu indikator penting adalah angka partisipasi kasar (APK). Angka ini menunjukkan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu. Nilai APK Surakarta untuk jenjang SD/MI dan SMA/MA/SMK lebih tinggi dibandingkan provinsi Jawa Tengah dan rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah pada tahun tahun 2017, namun untuk jenjang pendidikan SMP/MTs nilai APK Surakarta dibawah provinsi dan rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah.

APK jenjang SD/MI Surakarta tahun 2017 sebesar 110,37 dan menempati posisi kedua di bawah Kota Pekalongan sedangkan untuk jenjang SMP/MTs pada tahun yang sama adalah 87,93 dan menempati posisi keempat di bawah Kota Semarang, Kota Magelang, dan Salatiga. Untuk jenjang SMA/MA/SMK 103,55 yang menempati posisi keempat di bawah Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Magelang. Pendidikan jenjang SMA dan SMK saat tidak lagi dibawah pemerintah kota atau kabupaten, namun langsung di bawah provinsi.

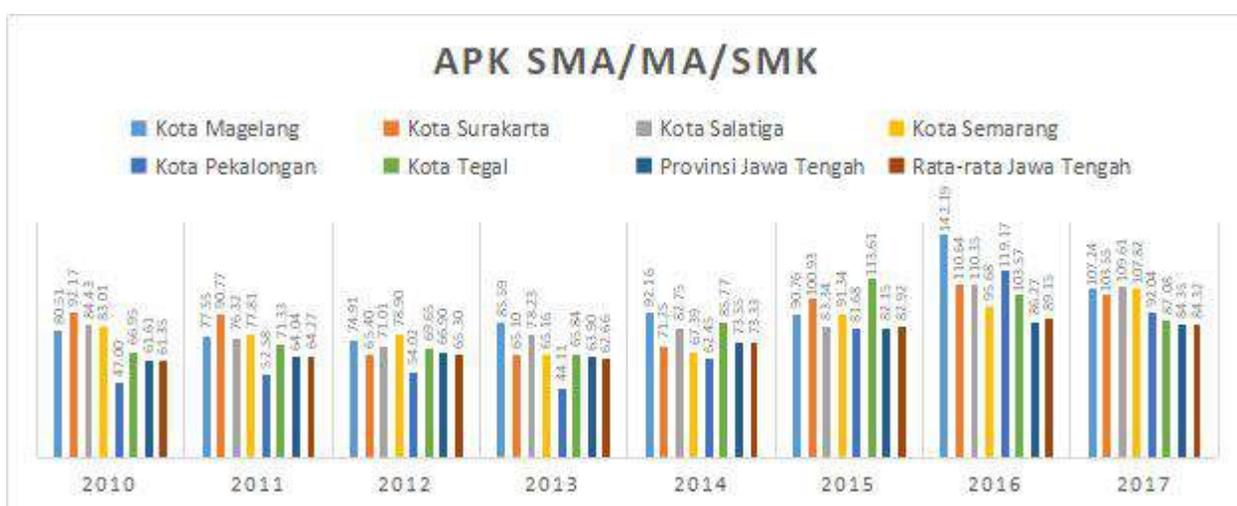
APK Surakarta untuk SD/MI terlihat berfluktuasi, missal pada tahun 2011, 2013, dan 2015 sempat mengalami penurunan disbanding tahun sebelumnya sementara untuk jnejang SMP/MTs juga mengalami fluktuasi yaitu sempat mengalami penurunan untuk tahun 2013 s.d. 2016. Untuk jenjang SMA/MA/SMK juga mengalami fluktuasi, bahkan di tahun 2012 terjadi penurunan yang cukup tajam dari 90,77 menjadi 65,40. DI ahun 2015, APK SMA/MA/SMK kembali naik sangat tajam dari 71,25 menjadi 100,93.



Gambar 4.9. Perbandingan APK SD/MI Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah



Gambar 4.10. Perbandingan APK SMP/MTs Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah



Gambar 4.11. Perbandingan APK SMA/MA/SMK Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah

Indikator sosial dan kesejahteraan yang juga memerlukan perhatian adalah indeks pembangunan gender (IPG) serta indeks pemberdayaan gender (IGD). Meskipun smooth, nilai IPG dan IDG Surakarta menunjukkan tren yang meningkat. Nilai IPG Surakarta sepanjang 2010-2017 selalu di atas provinsi Jawa Tengah dan nasional. Rata-rata pertumbuhan per tahun IPG selama periode tersebut adalah 0,22%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan provinsi maupun nasional.

Untuk IDG, nilai untuk Surakarta cenderung berfluktuatif. Nilai IDG tahun 2017 adalah 77,25 dan bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang besarnya 79,32 terjadi penurunan yang cukup besar. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di provinsi maupun nasional, yang IDG nya selalu naik sepanjang tahun. Rata-rata IDG seluruh daerah di Jawa Tengah pun juga selalu mengalami kenaikan sepanjang periode pengamatan.

Tabel 4.41. IPG (Indeks Pembangunan Gender)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata 2010-2017	Rata-rata Perubahan 2010-2017
1	Surakarta	95.28	95.32	95.70	96.16	96.48	96.38	96.38	96.74	96.05	0.22
2	Provinsi Jawa Tengah	90.32	90.92	91.12	91.50	91.89	92.21	92.22	91.94	91.51	0.25
3	Indonesia	89.42	89.52	90.07	90.19	90.34	91.03	90.82	90.96	90.29	0.24

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4.42. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata 2012-2017
1	Surakarta			79.32	78.93	74.93	74.98	n.a.	77.25	77.06
2	Provinsi Jawa Tengah	67.96	68.99	70.82	71.22	74.46	74.80	74.89	75.10	73.26
3	Indonesia	68.15	69.14	70.07	70.46	70.68	70.83	71.39	71.74	70.75
4	Rata-rata Jawa Tengah			64.71	65.80	67.37	68.16		68.35	66.86

Sumber: Badan Pusat Statistik

4.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA INDKATOR RPJMD

Capaian kinerja indikator RPJMD ini didasarkan pada target dan realisasi sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta 2016-2021. Dalam analisis ini terdapat beberapa kendala: (1) realisasi RPJMD pada 2017-2018 sulit diidentifikasi karena adanya ketidaksamaan indikator RPKD 2017 dan 2018 dengan dokumen RPJMD sehingga sulit untuk diperbandingkan, (2) nama dan jumlah program pada pelaksanaan RPJMD 2017 dan 2018 (RKPD 2017 dan 2018) tidak sama dengan dokumen RPJMD 2016-2021 Kota Surakarta.

Berdasarkan kendala tersebut, analisis indikator capaian kinerja RPJMD hanya memberikan gambaran umum serta gambaran model evaluasi tentang indikator penting berupa indikator utama makroekonomi, serta indikator yang dikaitkan dengan pernyataan misi sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta. Hasil perhitungan sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dan ketersediaan data.

Apabila indikator pendidikan berupa APK dan APM tidak diikutkan dalam perhitungan, dapat disimpulkan bahwa kinerja makroekonomi Kota Surakarta sepanjang 2016-2018 menunjukkan hasil sebagai berikut: Tahun 2016 nilai 101,60; tahun 2017 nilai sedikit turun menjadi 100,31 dan tahun 2018 naik menjadi 103,30. Penurunan yang terjadi pada tahun 2017 disebabkan karena beberapa indikator memiliki realisasi gap yang cukup besar dibandingkan dengan target. Nilai indikator di atas 90% berarti *sangat baik* sehingga secara umum kinerja makroekonomi Surakarta dapat dikatakan *sangat baik*.

Dalam hal pendidikan, cukup besar gap indikator pendidikan yang tidak tercapai selama 2016-2018. Bila indikator pendidikan ini digabungkan sebagai indikator utama, maka nilai capaian kinerja menunjukkan tren yang menurun, namun masih di atas 90% atau masih dalam klasifikasi *sangat baik*.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja makroekonomi Kota Surakarta secara internal selama 2016-2018 menunjukkan kecenderungan penurunan.
Penurunan

Tabel 4.33. Evaluasi Capaian Kinerja Utama Makroekonomi

No	Indikator	Target			Realisasi			Capaian Indikator		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Pertumbuhan ekonomi/PDRB	5 + 1	5 + 1	6 + 1	5.32	5.33	5.38	100.00	100.00	100.00
2	Tingkat inflasi	3 + 1	4 + 1	3 + 1	2.15	3.10	2.45	100.00	100.00	100.00
3	Indeks Gini	0.332	0.321	0.320	0.363	0.367		90.66	85.67	
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9.64	8.99	8.34	10.88	10.65	9.08	87.10	81.54	91.13
5	Angka Harapan Hidup (tahun)	77.08	77.11	77.16	77.03	77.06	77.11	99.94	99.94	99.94
6	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10.44	10.51	10.59	10.37	10.38	10.53	99.33	98.76	99.43
7	Harapan lama sekolah (tahun)	14.34	14.53	14.73	14.5	14.51	14.52	101.12	99.86	98.57
8	Pengeluaran per kapita (Rupiah)	14,291,000	14,806,000	15,301,000	13,900,000	13,986,000	14,528,000	97.26	94.46	94.95
9	Pendapatan per kapita (Rupiah)	58,142,285	60,922,566	63,823,146	73,642,589	79,714,537	85,679,431	126.66	130.85	134.25
10	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	97.08	97.37	97.67	96.38	96.74	96.82	99.28	99.35	99.13
11	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	5.83	5.76	5.68	4.50	4.47	4.39	122.81	122.40	122.71
							Rata-rata	101.60	100.31	103.30
12	Pendidikan	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
	a. APK PAUD	57.30	61.84	66.38	88.77	91.3		154.92	147.64	
	b. APK SD/MI/Paket A	105.00	105.00	105.00	106.90	106.93	103.86	101.81	101.84	98.91
	c. APK SMP/MTs/Paket B	99.98	103.32	106.65	101.01	100.07	98.91	101.03	96.85	92.74
	d. APM SD/MI/Paket A	97.82	98.26	98.69	95.56	95.60	93.02	97.69	97.29	94.25
	e. APM SMP/MTs/Paket B	88.50	90.80	93.10	76.75	77.36	74.82	86.72	85.20	80.37
							Rata-rata	106.19	103.84	91.30
							TOTAL	103.87	102.06	97.12

Dalam hal ketercapaian misi, indikator yang ada dalam RPJMD diklasifikasikan sesuai dengan pernyataan misi. Pengelompokan indikator ke dalam masing-masing misi ini bersifat subyektif (*professional judgement*). Mengingat keterbatasan data dan informasi, perhitungan hanya dilakukan berdasarkan data dan informasi yang tersedia, sehingga hal ini tidak secara penuh menggambarkan kinerja makroekonomi Kota Surakarta berdasarkan tingkat ketercapaian misi.

Secara umum, pada tahun 2018 masing-masing misi mampu direalisasikan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai masing-masing misi yang di atas 90%.

Tabel 4.34. Indikator Misi dalam RPJMD

Misi	Indikator RPJMD	Target			Realisasi			Capaian Indikator		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
WARAS	AHH	77.08	77.11	77.16	77.03	77.06	77.11	99.94	99.94	99.94
	AKI	52.28	52.28		46.4	70.37		111.25	65.40	
	AK Bayi	2.72	2.61	2.61	3.83	2.93		59.19	87.74	
	AK Balita	3.45	3.45	3.45	4.64	4.24		65.51	77.10	
	Cakupan peserta KB aktif	67.3			79.33			117.88		
	Laju pertumbuhan penduduk	0.8			0.19			176.25		
								98.18	81.54	99.94
WASIS	HLS	14.34	14.53	14.73	14.50	14.51	14.52	101.12	99.86	98.57
	RLS	10.44	10.51	10.59	10.37	10.38	10.53	99.33	98.76	99.43
	APK SD	105.00	105.00	105.00	106.90	106.93	103.86	101.81	101.84	98.91
	APK SMP	99.98	103.32	106.65	101.01	100.07	98.91	101.03	96.85	92.74
	APM SD	97.82	98.26	98.69	95.56	95.60	93.02	97.69	97.29	94.25
	APM SMP	88.50	90.80	93.10	76.75	77.36	74.82	86.72	85.20	80.37
	Angka Kelulusan	100			100			100.00		
	Jml pengunjung perpustakaan	532024			468582			88.08		
	Cakupan layanan pendidikan non formal	2.4			2.4			100.00		
	Atlet Cabor berprestasi	81.28			81.58			100.37		
	Rasio grup kesenian per 10.000	7.05			7.05			100.00		
	Pemuda/organisasi pemuda berprestasi	32			44			137.50		
	Persentase masy. Mendapat wawasan kebangsaan	54.86			52.12			95.01		
								100.08	96.48	93.80

WAREG	Tingkat Kemiskinan	9.64	8.99	8.34	10.88	10.65	9.08	87.10	81.54	91.13
	Tingkat Pengangguran	5.83	5.76	5.68	4.50	4.47	4.39	122.81	122.40	122.71
	Pengeluaran Perkapita	14,291,000.00	14,806,000.00	15,301,000.00	13,900,000.00	13,986,000.00	14,528,000.00	97.26	94.46	94.95
	Serapan tenaga kerja terampil	70.2			28.24			40.23		
	Produksi padi	1398			1177			84.19		
	Produksi peternakan	4014			5396			134.43		
	Produksi ikan	38			39			102.63		
	Ketersediaan pangan utama	161.56			84.69			52.42		
	Pencari kerja yang ditempatkan	74.89			56.05			74.84		
								83.19	98.05	102.02
MAPAN	Pertumbuhan Ekonomi	5 + 1	5 + 1	6 + 1	5.32	5.33	5.38	100.00	100.00	100.00
	PPK	58,142,285	60,922,566	63,823,146	73,642,589	79,714,537	85,679,431	126.66	130.85	134.25
	Tingkat Ketimpangan	0.332	0.321	0.320	0.363	0.367		90.66	85.67	
	Inflasi	3 + 1	4 + 1	3 + 1	2.15	3.1	2.45	100.00	100.00	100.00
	IPG	97.08	97.37	97.67	96.38	96.74	96.82	99.28	99.35	99.13
	Persentase penanganan PMKS	5.43			5.37			98.90		
	Tingkat perlindungan konsumen	75.97			83.72			110.20		
	Persentase jumlah swadaya masyarakat	11			11.43			103.91		
	Klaster industri yang berkembang	64.29			41.67			64.82		
	TPAK	53.7			59.83			111.42		
	Cakupan perempuan dan anak mendapat bantuan hukum	100			100			100.00		
	Pertumbuhan tenaga kerja KUKM yang dibina	2.01			2.22			110.45		
	Persentase wirausaha baru	2			3.05			152.50		
	Persentase kenaikan PAD	7			10			142.86		
	Persentase kenaikan investasi	5.68			121.47			2138.56		
	Jumlah kunjungan wisatawan	4500000			4395550			97.68		
	Persentase penerapan inovasi	6			6			100.00		
	Persentase SKPD yang menerapkan integrasi e-gov	17.07			21.95			128.59		

	Persentase SKPD yang menerapkan arsip secara baku	45.26			44.11			97.46		
	Ketersediaan SOP persandian	0			0					
	Maturitas SPIP	2.5			2.98			119.20		
	Persentase layanan Kec. Memenuhi ISO	45			37.92			84.27		
	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur	0.076			0.09			118.42		
	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	89.6			93.66			104.53		
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	0.03			0.03			100.00		
	Hasil AKIP EKPPD	3			3.19			106.33		
	Hasil AKIP LKjIP	60			53.78			89.63		
	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda	78.1			74.25			95.07		
	Kawasan cagar budaya dilestarikan	44.77			44.77			100.00		
	Penyelenggaraan seni budaya representatif	74.92			100			133.48		
								116.71	102.18	107.41
PAPAN	Penurunan RTLH	95.16			95.16			100.00		
	Lingkungan Kumuh									
	RT pengguna air bersih	85			81.05			95.35		
	RT besanitasi	98			97.42			99.41		
	Cakupan dokumen pengawasan AMDAL	50			40			80.00		
	Persentase transmigran	15.38			11.43			74.32		
	Persentase lingk. Sehat dan aman	93.47			92.79			99.27		
	Jaringan jalan dalam kondisi baik	75.59			80			105.83		
	Jembatan dalam kondisi baik	86			87.5			101.74		
	Persentase koridor BST terlayani	28.57			14.29			50.02		
	Persentase penanganan sampah	96.73			94.6			97.80		

	Persentase kelurahan tangguh bencana	1.96								
	Persentase penambahan ruang publik	0								
	Rasio RTH	9.72			9.72			100.00		
	Pasar rakyat representatif	65.91			63.64			96.56		
	Persentase prasarana umum kluster ekonomi kreatif	8			8			100.00		
	Persentase tempat ibadah dibina	43			43			100.00		
								91.41	N.A.	N.A.
TOTAL								97.30	94.22	100.67

4.4. PERINGKAT KINERJA MAKROEKONOMI KOTA SURAKARTA

Peringkat kinerja makroekonomi Kota Surakarta merupakan peringkat kinerja secara relative Kota Surakarta di level provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan indikator kinerja utama makroekonomi. Untuk itu dalam pemeringkatan ini dipergunakan indikator yang mencakup sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Pengeluaran perkapita
3. Pendapatan perkapita riil
4. Inflasi
5. Tingkat kemiskinan
6. Garis kemiskinan
7. Gini Ratio
8. Tingkat pengangguran
9. Angka Harapan Hidup (AHH)
10. Harapan Lama Sekolah (HLS)
11. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
12. APK SD
13. APK SMP
14. APM SD
15. APM SMP
16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
17. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
18. Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)

Prosedur pemeringkatan kinerja makroekonomi adalah sebagai berikut:

1. Menghitung rata-rata indikator makroekonomi masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah mulai tahun 2010 sampai dengan ketersediaan data terakhir
2. Menghitung rata-rata indikator makroekonomi untuk provinsi Jawa Tengah mulai tahun 2010 sampai dengan ketersediaan data terakhir.

3. Membandingkan rata-rata nilai indikator masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan factor penyebut atau pembagi berupa rata-rata nilai provinsi Jawa Tengah, serta rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah.
4. Hasil perbandingan dikalikan dengan bobot tertentu.
5. Menjumlahkan nilai masing-masing indikator di masing-masing kabupaten/kota setelah proses pembobotan untuk mendapatkan skor atau nilai akhir.
6. Menyusun peringkat berdasarkan skor akhir sekaligus melakukan proses normalisasi skor akhir. Normalisasi dalam hal ini adalah penyederhaan skor dengan menggunakan metode max-min, sehingga pemeringkatan yang diperoleh didasarkan pada nilai maksimum dan nilai minimum dari seluruh data yang diobservasi. Normalisasi tidak mengubah secara substansi dari hasil akhir, namun hanya memodifikasi hasil akhir.

Untuk memberikan gambaran hasil yang lebih obyektif, dipergunakan tiga scenario sebagai berikut:

1. Skenario 1:
 - a) indikator nomor 1 s.d. 8 diberi bobot 80% sedangkan indikator nomor 9 s.d. 18 diberi bobot 20% dengan pertimbangan, indikator yang relevan dengan makroekonomi secara langsung diberikan bobot yang lebih besar.
 - b) Dalam scenario ini, factor penyebut (pembagi) yang dipergunakan adalah rata-rata indikator provinsi Jawa Tengah.
 - c) Selanjutnya, juga akan dilakukan proses normalisasi untuk penyederhanaan hasil perhitungan berdasarkan nilai maksimum dan nilai minimum.
2. Skenario 2:
 - a) indikator diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok dengan bobot yang berbeda, yaitu: (a) Indikator Fundamental dengan bobot 30% meliputi indikator pertumbuhan ekonomi (60%) dan pendapatan perkapita riil (40%), (b) Indikator Kesejahteraan dengan bobot 50% meliputi indikator pengeluaran perkapita (10%), inflasi (15%), tingkat kemiskinan (20%), garis kemiskinan (10%), Gini Ratio (20%), dan tingkat pengangguran (25%), (c) indikator Sosial dengan bobot 20% meliputi indikator AHH

(20%), HLS (7,5%), RLS (10%), APK SD (15%), APK SMP (15%), APM SD (7,5%), APM SMP (7,5%), TPAK (7,5%), IPG (5%), IGD (5%).

- b) Dalam scenario ini, factor penyebut (pembagi) yang dipergunakan adalah nilai rata-rata indikator provinsi Jawa Tengah.
 - c) Selanjutnya, juga akan dilakukan proses normalisasi untuk penyederhanaan hasil perhitungan berdasarkan nilai maksimum dn nilai minimum.
3. Skenario 3:
- a) Klasifikasi dan bobot sama dengan scenario 2.
 - b) perbedaannya hanya terletak pada factor penyebut (pembagi). Bila dalam scenario 2 digunakan nilai rata-rata indikator provinsi Jawa Tengah, maka dalam scenario 3, dipergunakan nilai rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah sebagai factor penyebut (pembagi).
 - c) Dalam scenario 3, factor penyebut (pembagi) yang dipergunakan adalah nilai rata-rata seluruh daerah di provinsi Jawa Tengah.
 - d) Skenario 3 dihitung hanya pada tahun 2011 dan tahun 2017

4.4.1. Skenario 1

PERINGKAT	NILAI (SKOR) AKHIR		NILAI (SKOR) AKHIR-NORMALISASI	
	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KABUPATEN/KOTA	SKOR
1	Kota Surakarta	10.0652	Kota Semarang	6.0703
2	Kabupaten Kudus	9.8487	Kota Surakarta	5.6774
3	Kota Semarang	9.8485	Kota Salatiga	5.2470
4	Kota Magelang	9.6494	Kabupaten Semarang	4.8078
5	Kota Salatiga	9.2916	Kota Tegal	4.6630
6	Kabupaten Cilacap	9.2382	Kabupaten Sukoharjo	4.5933
7	Kota Tegal	9.0776	Kabupaten Klaten	4.5411
8	Kabupaten Brebes	8.7024	Kota Pekalongan	4.4879
9	Kabupaten Banyumas	8.5817	Kabupaten Karanganyar	4.4169
10	Kabupaten Sragen	8.4871	Kota Magelang	4.3861
11	Kabupaten Kendal	8.4706	Kabupaten Kudus	4.2347
12	Kabupaten Karanganyar	8.2926	Kabupaten Boyolali	4.2200
13	Kabupaten Klaten	8.2802	Kabupaten Pati	4.1122
14	Kabupaten Pati	8.2398	Kabupaten Rembang	3.9993
15	Kabupaten Rembang	8.2320	Kabupaten Pekalongan	3.9604
16	Kabupaten Sukoharjo	8.2139	Kabupaten Kendal	3.8910
17	Kota Pekalongan	8.1911	Kabupaten Jepara	3.8770
18	Kabupaten Semarang	8.1279	Kabupaten Sragen	3.8689
19	Kabupaten Purbalingga	8.1177	Kabupaten Wonogiri	3.8242
20	Kabupaten Kebumen	8.0637	Kabupaten Temanggung	3.6970
21	Kabupaten Demak	8.0635	Kabupaten Purworejo	3.6154
22	Kabupaten Wonosobo	7.9955	Kabupaten Demak	3.5904
23	Kabupaten Boyolali	7.9774	Kabupaten Magelang	3.5407
24	Kabupaten Tegal	7.8834	Kabupaten Blora	3.5344
25	Kabupaten Purworejo	7.8488	Kabupaten Purbalingga	3.4701
26	Kabupaten Blora	7.8425	Kabupaten Grobogan	3.4660
27	Kabupaten Pemalang	7.8364	Kabupaten Banyumas	3.4546
28	Kabupaten Pekalongan	7.7103	Kabupaten Batang	3.3345
29	Kabupaten Banjarnegara	7.7100	Kabupaten Kebumen	3.2276
30	Kabupaten Grobogan	7.6531	Kabupaten Pemalang	3.1874
31	Kabupaten Magelang	7.5660	Kabupaten Tegal	3.0433
32	Kabupaten Jepara	7.5503	Kabupaten Wonosobo	2.7472
33	Kabupaten Batang	7.5227	Kabupaten Brebes	2.6381
34	Kabupaten Wonogiri	7.4124	Kabupaten Cilacap	2.6173
35	Kabupaten Temanggung	7.3356	Kabupaten Banjarnegara	2.5614

4.4.2. Skenario 2

PERINGKAT	NILAI (SKOR) AKHIR		NILAI (SKOR) AKHIR-NORMALISASI	
	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KABUPATEN/KOTA	SKOR
1	Kota Semarang	1.3416	Kota Semarang	0.7091
2	Kabupaten Kudus	1.2799	Kota Surakarta	0.6677
3	Kota Surakarta	1.2435	Kota Salatiga	0.6203
4	Kota Salatiga	1.1977	Kabupaten Semarang	0.5896
5	Kabupaten Semarang	1.1385	Kabupaten Klaten	0.5815
6	Kota Magelang	1.1076	Kota Tegal	0.5636
7	Kabupaten Sukoharjo	1.0918	Kabupaten Sukoharjo	0.5603
8	Kota Tegal	1.0760	Kota Pekalongan	0.5592
9	Kabupaten Karanganyar	1.0693	Kabupaten Boyolali	0.5427
10	Kota Pekalongan	1.0575	Kabupaten Pati	0.5373
11	Kabupaten Boyolali	1.0491	Kabupaten Rembang	0.5358
12	Kabupaten Klaten	1.0433	Kabupaten Karanganyar	0.5340
13	Kabupaten Kendal	1.0375	Kabupaten Sragen	0.5158
14	Kabupaten Sragen	1.0347	Kota Magelang	0.5158
15	Kabupaten Temanggung	1.0200	Kabupaten Pekalongan	0.5142
16	Kabupaten Cilacap	1.0178	Kabupaten Jepara	0.4990
17	Kabupaten Wonogiri	1.0177	Kabupaten Kendal	0.4926

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

1. Secara umum, kinerja perekonomian Kota Surakarta bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah cukup bagus. Beberapa indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita riil, garis kemiskinan dan tingkat kemiskinan, serta tingkat pengangguran, menunjukkan kinerja makroekonomi Kota Surakarta masuk dalam peringkat atas.
2. Angka ketimpangan distribusi pendapatan Kota Surakarta menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini terlihat dari nilai indeks Gini maupun pengukuran menggunakan indeks Williamson.
3. Meskipun beberapa kasus menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta memiliki relevansi dengan tingkat ketimpangan, namun hal ini tidak terjadi di Kota Surakarta berdasarkan pengukuran nilai koefisien korelasi. Dengan demikian, permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surakarta tidak berkorelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi, namun oleh factor lain.
4. Korelasi antara nilai indeks Williamson dengan indeks Theil di masing-masing kecamatan menunjukkan adanya korelasi negative dengan nilai yang sangat kecil sehingga permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masing-masing kecamatan tidak berkaitan dengan konsentrasi kemiskinan sehingga ketimpangan dan konsentrasi kemiskinan merupakan dua permasalahan yang berbeda.

5.2. REKOMENDASI

Kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan tidak langsung, dan kebijakan yang langsung. Kebijakan tak langsung meliputi (1) upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik; (2) mengendalikan jumlah penduduk; (3) melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan kebijakan yang langsung mencakup: (1) pengembangan data dasar (base data) dalam penentuan kelompok sasaran (targeting); (2) penyediaan kebutuhan dasar (pangan,

sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan); (3) penciptaan kesempatan kerja; (4) program pembangunan wilayah; dan (5) pelayanan perkreditan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 2014. <https://surakartakota.bps.go.id/>. Diakses 13 Mei 2019.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2014. <https://jateng.bps.go.id/>. Diakses 13 Mei 2019.